

BERSUARA MELALUI TULISAN DI MOMENTUM HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA



WALHI
SULAWESI SELATAN

FAKTA
EKOLOGI

Buletin Fakta Ekologi merupakan publikasi yang awalnya dikembangkan dari serial 'Fakta Ekologi' yang terbit pertama kali pada bulan maret tahun 2023. Buletin ini diproduksi oleh Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulawesi Selatan. Sama halnya dengan buletin pada umumnya, Buletin Fakta Ekologi juga menyajikan rubrik yang terdiri dari empat bagian. Pertama, ada rubrik yang kami beri nama **Alarm SulSel** (berisi tentang infografis kondisi lingkungan hidup), Kedua ada **Fakta Ekologi** (laporan riset yang disajikan dalam bentuk tulisan atau Foto Esai), Ketiga ada **Cerita Kampung** (memuat cerita dan fakta dari akar rumput), dan terakhir yakni rubrik **Info WALHI SulSel** (berisi tentang informasi mengenai aktivitas WALHI Sulawesi Selatan). Selanjutnya, pada edisi Juni kali ini tim bersepakat mengangkat isu dalam rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Namun, edisi kali ini merupakan edisi spesial dengan menyajikan tulisan dari para pemerhati, aktivis, praktisi, dan juga akademisi yang konsen pada isu lingkungan hidup.

Tim Kerja Buletin Fakta Ekologi

Pimpinan Redaksi

Fadila Abdullah

Tim Penulis

Muhammad Riszky, Cucu Cahyanti, Muh Fachrul, Firdaus Cahyadi, Melbi Tanjung, Ashar Asis, Desy Wulandari, A.Rezky Pratama, Alan Ferdian Syah, Azi Wansaka, Silvani Andalita, Wahyu Hari Prayudo, Arifah Mutawaffika, Diexy Inkha Pradana, Iskandar wijaya, Riskan, S.P, Ahmad Zaki Mubarok, Randi Syafutra dan Faika Alhabsyie.

Desain dan Tata Letak

Fitrah Yusri

Editor

Slamet Riadi

Edisi Spesial

**Peringatan Hari
Lingkungan Hidup Sedunia 2025**



Ekologi Lestari dan Ekonomi Bertumbuh: Praktik Buka Tutup dari Spermonde yang Menginspirasi

Ditulis oleh: Muhammad Riszky

Pulau Lanjukang, merupakan pulau terdepan dari Kota Makassar yang juga bagian dari perairan Spermonde. Banyak orang mengenal Pulau Lanjukang sebagai salah satu destinasi wisata pantai dan laut yang populer.

Pasirnya yang putih serta lautnya yang dapat kita jumpai dalam empat warna biru. Namun, keajaiban justru tersembunyi di balik riak permukaannya. Keindahan bawah lautnya tak kalah dengan kondisi permukaan, dipenuhi oleh terumbu karang dan berbagai biota laut semakin memanjakan kita untuk menikmati Pulau Lanjukang.

Namun di tengah situasi tersebut, Pulau Lanjukang tidak terlepas dari ancaman. Ancaman nyatanya adalah dampak krisis iklim yang membuat kenaikan suhu air laut. Kondisi ini menyebabkan terumbu karang cepat memutih.



Pulau Lanjukang dari udara. (Foto: YKL Indonesia)

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) sebuah lembaga riset dari Amerika Serikat menjelaskan jika suhu naik antara 0-1 °C akan menyebabkan stress pada karang. Jika suhu terus bertahan maka akan menyebabkan putih dan berakhir dengan kematian.

Matinya karang tentu akan menimbulkan hilangnya biota laut lainnya sehingga membuat potensi pariwisata hilang. Hal ini juga menyebabkan nelayan akan semakin jauh untuk melaut untuk mendapatkan ikan.

Dampak negatif akibat krisis iklim ditambah dengan berbagai faktor yang menyebabkan penurunan kualitas ekologi di perairan Pulau Lanjukang mendorong masyarakat untuk menerapkan solusi berkelanjutan yaitu melalui sistem buka tutup penangkapan gurita.

Ketika Laut Butuh Istirahat

Buka tutup penangkapan gurita merupakan inisiasi nelayan di Pulau Lanjukang dan Langkai yang dimulai sejak tahun 2021. Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia mendampingi sejak awal hingga penerapannya. Awalnya para nelayan tidak mengenal sistem tersebut, lantaran sejak turun temurun hanya langsung menangkap ikan di laut tanpa adanya area yang ditutup sementara.

Hal yang mendorong nelayan untuk menerapkan sistem buka tutup penangkapan gurita karena terdapat perilaku penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti bius dan bom di perairan Lanjukang dan Langkai. Belum lagi faktanya jika perairan di kedua pulau tersebut menjadi lokasi penangkapan dengan keanekaragaman yang tinggi, nelayan dari luar pulau lainnya pun datang untuk menangkap ikan.



Lokasi Sistem Buka Tutup Gurita di Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang tahun 2022 (Peta; YKL Indonesia)

Kesadaran nelayan untuk melindungi wilayah lautnya dari ancaman kerusakan yang parah mendorong diterapkannya sistem tersebut. Sistem buka tutup penangkapan gurita merupakan upaya dalam memberikan waktu gurita untuk bertumbuh dan mencapai berat yang layak untuk ditangkap oleh nelayan. Sistem ini ditutup berdasarkan kesepakatan nelayan Pulau Lanjukang dan Langkai dengan durasi 3 bulan.

Setelah mendapatkan pendampingan dan juga belajar dari nelayan di Kabupaten Wakatobi, akhirnya nelayan sepakat untuk melakukan uji coba dengan menutup area seluas 203,42 hektar sejak Februari – Maret 2022. Uji coba kedua pada area seluas 116,64 hektar sejak Agustus – Oktober 2022.

Laut Pulih, Nelayan Tersenyum

Riset tutupan karang yang dilakukan oleh YKL Indonesia bersama dengan nelayan di Pulau Lanjukang dan Langkai pada tahun 2021 mendapatkan persentase tutupan karang rerata 20 persen. Jika melihat aturan Kepmen LH No. 4/2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang, maka tutupan karang di kedua pulau tersebut masuk dalam kategori rusak ringan.

Sejak penerapan sistem buka tutup penangkapan gurita dilakukan oleh nelayan, berdampak terhadap perbaikan kualitas terumbu karang. Data dari YKL Indonesia yang melakukan reef check pada tahun 2023 menunjukkan persentase tutupan karang hidup menjadi 25 – 40 persen.



Salah seorang nelayan berhasil mendapatkan gurita dalam pembukaan area buka tutup penangkapan gurita yang dilaksanakan pada Rabu (16/04/2025) di Pulau Lanjukang.
(Foto: Muhammad Riszky/Iaring Nusa)

Naiknya persentase tutupan karang hidup juga berdampak terhadap biota laut yang terancam punah ditemukan di perairan Lanjukang. Berdasarkan hasil observasi ditemukan 6 spesies yakni Whale shark (*Rhincodon typus*), thresher shark (*Alopias sp.*), Shortfin mako (*Isurus oxyrinchus*), Black tip (*Carcharhinus sp.*), Hawksbill sea turtle (*Eretmochelys imbricata*) dan Green sea turtle (*Chelonia mydas*).

Gurita sendiri juga mengalami peningkatan dari segi berat dan jumlah tangkapan nelayan. Sepanjang Juni 2021 hingga Juli 2023, YKL Indonesia mencatat total tangkapan mencapai 20 ton dengan rerata berat 18,6 kg per hari. Nilainya sendiri mencapai 1,2 miliar rupiah.

Penulis berkesempatan untuk melihat pembukaan area buka tutup penangkapan gurita di Pulau Lanjukang pada April 2025. Setelah ditutup selama 3 bulan, nelayan dari Pulau Lanjukang dan Langkai secara serentak menangkap gurita. Hanya dalam waktu sekitar 1 jam 30 menit, nelayan berhasil mendapatkan 52 ekor gurita dengan berat total 54 kg.

Bukan hanya jumlah dan beratnya yang besar, melainkan kualitas guritanya juga meningkat. Dari hasil pencatatan yang dilakukan, sebanyak 5 ekor masuk kategori grade A, 17 ekor grade B, 25 ekor grade C, dan masing-masing 1 ekor untuk grade D dan E. Hal itu tentunya membuat harga gurita juga semakin besar dan menambah pemasukan bagi nelayan itu sendiri.

Rekognisi yang Menginspirasi

Penerapan sistem buka tutup penangkapan gurita tidak hanya sebatas pada penutupan lokasi, tapi yang paling penting adalah adanya kepastian hukum untuk melindungi eksistensi upaya yang telah dilakukan nelayan. Pada tahun 2025, nelayan melalui Forum Pasibuntuluki telah mengajukan lokasi penangkapan mereka masuk dalam Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Pulau Lanjukang.

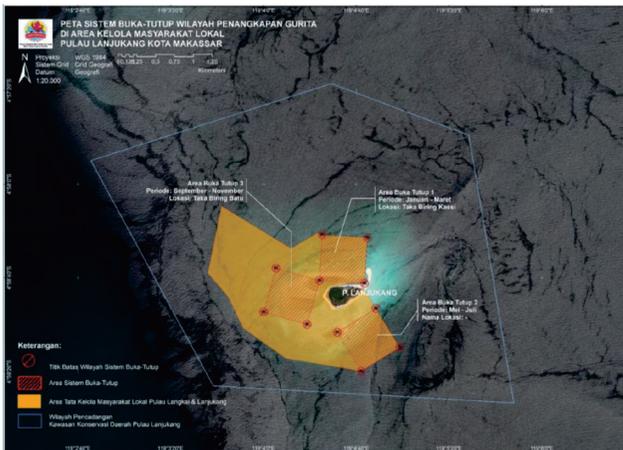
Pada Kamis (22/05/2025) dilakukan konsultasi publik sebagai upaya percepatan KKD Pulau Lanjukang. Konsultasi ini dihadiri berbagai stakeholder untuk merumuskan kebijakan yang berpihak kepada nelayan dalam melindungi upaya yang telah dilakukan selama kurang lebih 4 tahun. Rencana KKD Pulau Lanjukang yang diusulkan sebesar 1.653,53 hektar. Harapannya pengakuan atas upaya nelayan dapat direalisasikan pada tahun ini dengan dimasukkan area buka tutup penangkapan gurita dalam KKD

Pulau Lanjukang. Hal itu akan berdampak terhadap keberlanjutan ekosistem laut serta ekonomi nelayan yang terus bertumbuh.

Pembelajaran dari Pulau Lanjukang dan Langkai dalam menjaga sumber daya lautnya secara berkelanjutan dengan serangkaian aktivitas panjang menjadi ruang belajar yang dapat direkognisi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini semakin memperkaya upaya nelayan di Indonesia dalam menjaga lautnya. Di Maluku dan Papua terdapat sasi, di Lombok ada awig-awig dan penerapan buka tutup sendiri telah banyak dilakukan pada berbagai daerah.

Bukti bahwa nelayan punya cara sendiri dan arif dalam menjaga lautnya, tidak hanya untuk jangka pendek melainkan jangka panjang. Berbagai pembelajaran ini dapat menjadi acuan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat yang ada di pesisir, laut dan pulau kecil.

Karena laut yang sehat bukan hanya tentang hari ini, melainkan tentang generasi yang akan datang yang seharusnya masih bisa menikmati keindahan dan manfaatnya!



Peta sistem buka tutup penangkapan gurita yang diterapkan oleh nelayan di Pulau Lanjukang dan Pulau Langkai hingga saat ini terdapat 3 area. (Peta: Forum Pasibuntuluki)

Menjaga Bumi Dari Puncak Karst

Ditulis oleh: Desi Wulandari

Pada deretan puncak Gunung Wayang yang merupakan salah satu gugusan karst tua di wilayah Gunungkidul, Yogyakarta terletak sebuah kampung kecil bernama Kampung Pitu. Ketinggiannya yang mencapai 750 meter di atas permukaan laut, sehingga menjadikannya sebagai permukiman tertinggi di sisi timur Gunung Api Purba Nglangeran. Sebelum tahun 2015 kampung ini tak dikenal karena letaknya yang terisolir. Namun siapa sangka, keterpencilannya justru menjadi benteng terakhir nilai-nilai ekologis yang langka ditemukan di tempat lain.

Kampung Pitu bukanlah nama sebenarnya, karena sesungguhnya kampung itu bernama Kampung Tlogo. Namun, Pitu yang dalam bahasa Jawa berarti tujuh menjadi branding yang melekat erat sebagai nama baru bagi Kampung Tlogo. Tujuh berarti batas jumlah keluarga yang diizinkan tinggal di kampung itu oleh perjanjian leluhur. Menurut kisah yang tercatat dalam ingatan kolektif warga, tanah Kampung Pitu merupakan hasil sayembara spiritual yang diadakan oleh Keraton. Leluhur mereka adalah Mbah Iro Dikromo yang berasal dari Banyumas. Mbah Iro memenangkan sayembara untuk mengambil pusaka dari puncak Gunung Wayang sehingga mendapatkan hak tinggal dengan satu syarat: hanya sejumlah tujuh keluarga keturunannya yang boleh mendiami tempat lanskap di atas bukit karst tersebut. Ia kemudian mengajak adiknya, yaitu Mbah Thir untuk tinggal. Hingga saat ini penduduk Kampung Pitu hanya terdiri dari keturunan dari Mbah Iro dan Mbah Thir.

Menuju Kampung Pitu bukanlah perjalanan yang mudah. Tidak ada transportasi umum yang menjangkau lokasi ini. Dari titik jalan aspal terakhir di Dusun Terbah, perjalanan harus melewati jalan sempit menanjak dengan tikungan tajam, jurang di sisi kanan-kiri, dan bongkahan batu besar dari masa Miosen berada di kiri kanan jalan. Tingkat kemiringan beberapa tanjakan mencapai hampir 90 derajat, sehingga kendaraan dengan mesin matic tidak disarankan. Kondisi yang jauh dari jalan layak inipun baru dibangun dengan cor semen pada tahun 2015—sebelumnya hanya berupa

jalan berbatu-batu licin serupa aliran sungai kering yang dijadikan akses keluar masuk kampung.

Rumah-rumah di Kampung Pitu dibangun menyebar mengikuti bukit dan kepemilikan tanah masing-masing keluarga. Topografi berbukit serta pemisahan sosial berdasarkan garis keturunan membuat rumah-rumah saling berjauhan. Di antara ladang-ladang mereka terdapat batu-batu besar yang tidak boleh dipindahkan karena merupakan bagian dari sultan ground, yaitu tanah milik keraton Ngayogyakarta. Jadi di tengah ladang milik warga, terdapat batu besar yang merupakan bagian dari sultan ground. Meskipun batu tersebut tidak diukur dalam sertifikat, tetapi dihormati sebagai penjaga alam.

Menariknya, tanah-tanah di kampung ini tidak diperjualbelikan kepada orang luar Kampung Pitu. Transaksi hanya boleh dilakukan antar keturunan Kampung Pitu. Mereka tidak melihat tanah sebagai aset ekonomi, melainkan sebagai perpanjangan identitas dan tanggung jawab ekologis. Dengan cara inilah ruang hidup di Kampung Pitu tetap terjaga dari tekanan komersialisasi dan invasi pembangunan luar. Karena hidup di wilayah karst di ketinggian berarti hidup dalam keterbatasan.

Kampung Pitu mempunyai satu-satunya sumber mata air, yaitu Tlogo Guyangan. Mata air ini terletak di bawah pohon beringin tua dan telah dijaga secara spiritual maupun praktis. Tlogo Guyangan menjadi pusat kehidupan masyarakat Kampung Pitu, mulai dari mandi, mencuci, mengambil air, dan melangsungkan ritual. Dahulu kala, Tlogo guyangan mengeluarkan air melimpah hingga menjadi telaga. Namun saat ini, telaga telah kering dan dimanfaatkan untuk sebagai area persawahan oleh warga.

Menurut cerita, zaman dulu semua warga menimba air menggunakan klenting. Setiap harinya warga mengambil air dari Tlogo Guyangan ke rumah masing-masing. Ritual dan kegiatan bersih-bersih sumber air rutin dilakukan. Namun, sejak tahun 2015 ketika pembangunan mulai masuk, pompa air-pun mulai digunakan. Pada tahun 2023 lima dari tujuh keluarga telah menggunakan pompa air. Dan Tahun 2024, PDAM masuk menawarkan sumber air baru.

Dalam pertanian, warga menanam padi dua kali setahun. Sayur dan buah-buahan ditanam untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Tanaman

rimpang-rimpangan ditanam untuk pengobatan warga saat sakit, mengingat jarak fasilitas kesehatan yang jauh.

Ekowisata dan Godaan Kenyamanan Baru

Perubahan perlahan terasa sejak kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran dijadikan destinasi ekowisata, yaitu konsep wisata yang seharusnya mendorong keberlangsungan lingkungan. Kampung Pitu yang dahulu sunyi dan sepi mulai disorot. Media televisi, video dokumenter, hingga konten-konten digital mulai mengangkatnya sebagai kampung unik yang hanya dihuni tujuh keluarga. Sejak branding Kampung Pitu diangkat, arus wisatawan mulai berdatangan. Mereka naik jeep, berfoto di titik-titik favorit seperti Watu Bantal, dan mampir ke warung satu-satunya yang kini menjelma menjadi titik ekonomi baru.

Bersamaan dengan itu, pembangunan fisik pun masuk. Jalan dicor semen, listrik dipasang, dan jaringan internet mulai menjangkau wilayah yang sebelumnya gelap gulita. Pada titik ini, modernisasi memberi kenyamanan baru. Air tak lagi harus diangkut dengan kendi dari sumur, cukup dengan menyalakan pompa sanyo. Rumah-rumah kini punya akses internet, anak-anak bisa belajar pada malam hari. Semua ini, tentu saja, membawa manfaat. Namun pertanyaannya: di balik semua kemajuan itu, apa yang dikorbankan? Perubahan teknologi tidak netral. Ketika air bisa dialirkan ke semua rumah dengan mesin, maka batas antara kebutuhan dan keinginan mulai kabur. Kesadaran akan keterbatasan mulai terkikis. Tak ada lagi rasa lelah karena berjalan kaki jauh ke sumber air, dan dengan itu pula, tak ada lagi jeda untuk merenung sejenak: seberapa banyak air yang benar-benar dibutuhkan karena kini air didapat semudah memutar kran.

Selain itu, pembangunan infrastruktur membuka akses lebih luas—tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga bagi pasar dan investor. Kontestasi pun tak terelakkan. Tidak semua rumah memiliki lokasi strategis untuk dijadikan titik kunjungan wisata. Maka mereka yang berada di titik yang lebih instagramable atau bagi warga yang mempunyai kemampuan bercerita kepada wisatawan mulai memetik keuntungan lebih. Warung yang berada di jalur jeep wisata mendapatkan pengunjung, sementara rumah lain hanya dilalui dan menjadi penonton.

Komodifikasi budaya di Kampung Pitu bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh inti dari nilai-nilai spiritual dan ekologis masyarakat. Beberapa upacara adat, seperti rasulan dan mong-mong (ritual kelahiran anak sapi atau kendaraan baru) mulai ditampilkan atas permintaan wisatawan. Bahkan pernah ada permintaan untuk menggelar ritual hanya agar bisa disaksikan dan didokumentasikan. Beberapa tempat yang sebelumnya dikeramatkan, seperti Tlogo Guyangan dan kompleks makam leluhur mulai menjadi bagian paket wisata.

Tidak semua warga menyetujui arah perubahan ini. Mbah Yatno, seorang sesepuh Kampung Pitu, menyuarakan kekhawatirannya. Baginya, doa-doa dalam ritual bukanlah sekadar simbol, melainkan jembatan komunikasi dengan leluhur mereka. “Yo nek iso ki ojo mung dinggo tontonan, sebab opo seng didunungke ki klebune nggo eyang sek sekti-sekti mbiyen,” ujarnya—mengungkapkan keprihatinan bahwa apa yang diniatkan sebagai persembahan spiritual janganlah hanya jadi hiburan semata. Mbah Yatno juga menyesalkan kegiatan bersih-bersih sendang mulai tidak dilakukan, karena kini sendang bukan lagi satu-satunya sumber air mereka.

Namun, tidak sedikit pula warga yang menyambut baik komodifikasi budaya karena melihat peluang ekonomi. Pak Aan misalnya, adalah tokoh kunci yang aktif menyusun narasi sejarah Kampung Pitu dan menyambut wisatawan dengan cerita-cerita lokal. Ia aktif menjaring jejaring dari luar kampung pitu dan mempromosikan rumah ke delapan menjadi objek wisata baru sebagai rumah yang dikutuk. Dengan narasi yang dibuatnya, ia mendapatkan kunjungan wisatawan dan media lebih daripada warga lain di Kampung Pitu. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan kompleksitas komodifikasi: antara pelestarian dan pengalihan makna. Apa yang dulunya sakral dan hanya dijalani dalam lingkaran keluarga atau komunitas, kini masuk ke dalam kalender kegiatan wisata. Ritual bukan lagi semata-mata ruang kontemplasi, tetapi kadang menjadi instrumen promosi. Komodifikasi tidak selalu berarti penghapusan budaya, tetapi bisa mengaburkan garis antara warisan dan pertunjukan, antara penghormatan dan komersialisasi.

Transformasi yang terjadi di Kampung Pitu mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara pembangunan dan keberlanjutan. Di satu sisi, pembangunan membawa fasilitas dan peluang ekonomi. Di sisi lain, ia

menggeser nilai, mengubah praktik, dan menyusup ke dalam ruang-ruang yang sebelumnya dilindungi oleh budaya.

Keseimbangan ekologis yang dijaga selama puluhan tahun bukanlah sistem yang kaku. Ia justru lentur, adaptif, dan kaya akan pemahaman lokal. Namun sistem ini bekerja dalam kesunyian—tanpa publikasi, tanpa spanduk proyek. Dan justru karena sunyi itulah, ia mudah dilupakan atau digantikan.

Ketika pembangunan dijalankan dengan logika maksimalisasi dan efisiensi, segala bentuk pembatasan kerap dipandang sebagai hambatan. Dalam kebijakan yang hanya mengacu pada indikator fisik dan ekonomi, aturan seperti larangan membangun rumah kedelapan atau menjaga jumlah keluarga dianggap tak masuk akal. Padahal, justru di situlah tersembunyi kearifan ekologis masyarakat Kampung Pitu. Pembatasan jumlah keluarga mencerminkan kesadaran akan batas kemampuan alam. Jika di luar konsep seperti carrying capacity dipahami secara teknis, di Kampung Pitu nilai itu dijalani sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari—tanpa istilah akademik, namun sarat makna dan keberlanjutan.

Menakar Kembali Makna Pembangunan

Tulisan ini bukan bentuk penolakan terhadap pariwisata atau pembangunan. Yang ditawarkan adalah peringatan: bahwa keberlanjutan tidak bisa hanya diukur dari banyaknya wisatawan, bertambahnya penginapan, atau bertambahnya pendapatan desa. Keberlanjutan sejati adalah ketika pembangunan mampu menjaga keberlanjutan hidup masyarakat dan alam secara bersama.

Masyarakat Kampung Pitu selama ini telah menjalankan prinsip keberlanjutan tanpa menyebutnya demikian. Mereka membatasi populasi bukan karena instruksi pemerintah, tetapi karena kepercayaan yang mengakar pada pengalaman hidup. Mereka merawat mata air tanpa perlu diajari konservasi. Mereka melakukan rotasi tanam dan membiarkan lahan istirahat tanpa perlu program dari luar.

Sayangnya, semua itu bisa hilang dalam waktu singkat jika tidak ada pengakuan dan penghargaan terhadap sistem yang sudah ada. Jika pembangunan tidak menghormati pengetahuan lokal, maka yang dibangun bukan masa depan, tetapi krisis baru yang dibungkus dengan nama kemajuan.

Di tengah gempuran krisis iklim dan degradasi lingkungan global, Kampung Pitu memberikan pelajaran yang sangat relevan. Bahwa bumi tidak hanya bisa diselamatkan dengan teknologi, tetapi juga dengan cara berpikir dan bertindak yang penuh kesadaran akan batas.

Masyarakat Kampung Pitu mengajarkan kita bahwa menjaga lingkungan bukan perkara proyek atau dana hibah. Ia adalah soal sikap hidup. Mereka tidak menolak pembangunan, tapi mengingatkan bahwa pembangunan tanpa kontrol bisa menghancurkan apa yang sebelumnya mereka jaga selama berpuluh-puluh tahun.

Di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, mari berhenti sejenak dari gegap gempita perayaan. Mari menunduk ke tanah dan mendengarkan mereka yang selama ini merawatnya dalam diam.

Krisis Lingkungan Indonesia: Menuju Paradigma Baru Pengelolaan Sumber Daya Alam

Ditulis oleh: Alan Ferdian Syah

Dari 625 sungai yang dipantau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun lalu, 375 di antaranya tergolong tercemar berat, 187 sungai mengalami pencemaran sedang, sedangkan sisanya berada dalam kondisi cemar ringan hingga baik. Data ini merupakan potret nyata bagaimana kondisi lingkungan hidup Indonesia menghadapi krisis yang multidimensional. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pernah menyoroti urgensi perlindungan ekosistem sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Namun, realitanya banyak praktik eksploitatif yang masih terjadi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Sebuah kasus konkret terjadi pada Sungai Brantas yang mengalami pencemaran masif akibat limbah industri dan domestik. Mahkamah Agung bahkan memerintahkan Pemerintah Jawa Timur untuk memasang CCTV dan alat pemantau kualitas air secara real-time. "Ini bukan sekadar masalah pencemaran lokal, tetapi cerminan sistemik dari lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Jika degradasi ekosistem terus dibiarkan, daya dukung lingkungan untuk generasi mendatang akan hancur,"

ujar Nety Widayati, Direktur Pengendalian Pencemaran Air KLHK (Mongabay, 20 September 2024).

Dampak Struktural Degradasi Lingkungan

Degradasi lingkungan hidup menjadi masalah serius yang memiliki implikasi mendalam terhadap keberlanjutan pembangunan nasional. Berdasarkan perspektif teoritis yang dikemukakan oleh Hardin (1968) dalam teori *tragedy of the commons*, eksploitasi sumber daya alam tanpa pengelolaan yang tepat akan mengakibatkan keruntuhan ekosistem secara masif. Sementara itu, Ostrom (1990) dalam konsep *common pool resources* menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya bersama memerlukan institusi yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat untuk mencegah degradasi (Fauzi, 2019).

United Nations Environment Programme (UNEP) mendefinisikan degradasi lingkungan sebagai deteriorasi lingkungan melalui berkurangnya sumber daya seperti udara, air, dan tanah; penghancuran ekosistem; dan kepunahan habitat satwa liar. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup manusia. Berdasarkan Environmental Performance Index 2024, Indonesia berada pada peringkat 164 dari 180 negara dalam hal kinerja lingkungan.

Studi yang dilakukan oleh Indonesian Center for Environmental Law (2023) melalui survei terhadap 75 titik pemantauan di lima DAS utama Indonesia mengungkapkan bahwa 68% dari titik tersebut menunjukkan indikator pencemaran berat, dan 82% industri di sepanjang DAS tidak memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai. Hasil penelitian ini menunjukkan fenomena yang lebih luas, di mana pencemaran tidak hanya bersifat *point source* tetapi juga telah menjadi masalah sistemik yang melibatkan berbagai sektor.

Menyoroti beberapa wilayah seperti Jawa dan Sumatera yang memiliki tingkat deforestasi tinggi, menurut Kartodihardjo, H. (2021) dalam jurnal "Tata Kelola Hutan di Era Otonomi Daerah," lemahnya koordinasi antar lembaga dan tumpang tindih kewenangan menjadi faktor utama tingginya angka degradasi hutan di kedua pulau tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa pembahasan tentang lingkungan hidup tidak semata-mata berbicara

tentang ekologi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tata kelola pemerintahan, sistem ekonomi, serta kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan.

Praktik Eksploitasi dan Komodifikasi Lingkungan

Berangkat dari latar belakang di atas, sumber daya alam yang seharusnya dikelola berkelanjutan justru sering kali dieksploitasi untuk kepentingan jangka pendek. Para pemangku kebijakan, mulai dari pejabat pusat hingga daerah, semuanya memainkan peran dalam menciptakan kondisi eksploitatif masing-masing. Setiap izin yang diberikan selalu mempertimbangkan keuntungan ekonomi semata tanpa kalkulasi dampak lingkungan yang komprehensif.

Proyek pembangunan dijadikan justifikasi untuk mengabaikan prinsip-prinsip konservasi. Ketika akan memberikan izin, yang dipertimbangkan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), investasi, dan penyerapan tenaga kerja, sementara analisis dampak lingkungan hanya dijadikan formalitas administrasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Walhi (2023), dari 120 proyek pembangunan yang diteliti, 89% di antaranya tidak memiliki kajian dampak lingkungan yang komprehensif dan hanya 23% yang melakukan monitoring pasca konstruksi.

Ekosistem yang seharusnya dilindungi justru harus melewati "penilaian ekonomi" dari pihak yang tidak memahami kompleksitas ekologi. Penelitian Sari & Budiman (2024) mengungkapkan bahwa 71% keputusan terkait alih fungsi lahan melibatkan pertimbangan ekonomi tanpa memadai mengevaluasi nilai ekosistem dan jasa lingkungan yang hilang.

Program-program konservasi yang dilakukan hanya dijadikan pencitraan semata. Yang terpenting adalah menghabiskan anggaran dan mengambil dokumentasi untuk pelaporan kepada pusat. Kegiatan yang dibuat tidak menyentuh akar masalah degradasi lingkungan dan hanya fokus pada target kuantitatif. Berdasarkan evaluasi terhadap 95 program konservasi daerah oleh Forum Lingkungan Indonesia (2023), 76% responden merasa bahwa program konservasi pemerintah tidak efektif dalam mengatasi masalah lingkungan dan 69% melihat adanya miss prioritization dalam alokasi anggaran lingkungan.

Membangun Paradigma Baru dalam Kebijakan Lingkungan: Solusi Holistik

Menurut perspektif teori pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan oleh Brundtland Commission (1987), perlu adanya transformasi paradigmatik dalam pengelolaan lingkungan yang mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial secara seimbang. Solusi konkret yang dapat diimplementasikan adalah pembentukan Badan Pengelolaan Lingkungan Terintegrasi yang terdiri dari para ahli ekologi, ekonom lingkungan, dan praktisi yang memiliki integritas untuk mengawasi implementasi kebijakan lingkungan. Model ini telah berhasil diterapkan di negara-negara seperti Denmark dengan Environmental Protection Agency-nya dan Singapura dengan National Environment Agency (Pearce & Turner, 2020). Institusi semacam ini dapat menjamin objektivitas dan profesionalisme dalam pengambilan keputusan terkait perizinan dan pengelolaan sumber daya alam.

Bersamaan dengan itu, pengembangan sistem monitoring lingkungan berbasis teknologi digital juga perlu digalakkan melalui program kolaboratif antara institusi penelitian, komunitas lingkungan, dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan melalui real-time monitoring. Menurut Zhang (2023), implementasi IoT dan big data analytics dalam monitoring lingkungan terbukti meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran hingga 65% di negara-negara Asia Timur.

Reformasi sistem environmental impact assessment (EIA) juga menjadi langkah krusial untuk menciptakan mekanisme evaluasi yang lebih rigorous dan independen dalam setiap proyek pembangunan. Sistem peer-review yang melibatkan ahli lingkungan independen dapat meminimalisir bias kepentingan ekonomi, sebagaimana telah dibuktikan efektif di negara-negara Nordik (Hildén et al., 2021). Sistem EIA yang komprehensif akan mendorong terciptanya pembangunan yang lebih sustainable dan mengurangi risiko kerusakan ekosistem.

Di era digital, pengembangan platform citizen science untuk monitoring lingkungan juga menawarkan solusi inovatif dengan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pemantauan kualitas lingkungan. Studi yang dilakukan oleh Environmental Monitoring Network (2024) menunjukkan

bahwa partisipasi masyarakat dalam monitoring lingkungan telah terbukti meningkatkan awareness dan compliance terhadap regulasi lingkungan. Platform digital dapat menjadi jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi dalam pengelolaan lingkungan yang lebih demokratis dan partisipatif.

Tidak kalah pentingnya adalah implementasi green fiscal policy yang mendorong internalisasi biaya lingkungan dalam setiap kegiatan ekonomi melalui instrumen ekonomi seperti carbon tax, payment for ecosystem services, dan green bonds. Data empiris dari berbagai negara menunjukkan bahwa instrumen ekonomi lebih efektif dalam mengubah perilaku pelaku ekonomi dibandingkan dengan pendekatan command and control semata. Fungsi checks and balances perlu diterapkan secara konsisten kepada pengelola kebijakan lingkungan agar praktik eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan tidak menjadi kebiasaan yang merusak ekosistem. Gunakanlah kekuasaan yang dimiliki dengan bijak, sesuai prinsip keberlanjutan dan tepat sasaran. Berikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, mengingat bahwa lingkungan hidup adalah milik bersama yang memerlukan tanggung jawab kolektif.

Jika Indonesia dan para pemangku kebijakannya mampu menumbuhkan paradigma baru ini, pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dapat berkembang dan memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan bangsa tidak hanya dalam dimensi ekologis tetapi juga dalam penguatan ekonomi hijau, ketahanan pangan, dan pembangunan yang berkeadilan antar generasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Brundtland Commission. (1987). Our common future. Oxford University Press.
- Environmental Monitoring Network. (2024). Citizen science in environmental management: Lessons from Southeast Asia.
- Fauzi, A. (2019). Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan: Teori dan aplikasi. Gramedia Pustaka Utama.
- Forum Lingkungan Indonesia. (2023). Evaluasi program konservasi daerah di Indonesia 2020–2023.
- Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. *Science*, 162(3859), 1243–1248. <https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243>
- Hildén, M., Furman, E., & Kaljonen, M. (2021). Environmental impact assessment in the Nordic countries: Evolution and innovation. Routledge.
- Indonesian Center for Environmental Law. (2023). Laporan studi: Status pencemaran daerah aliran sungai di Indonesia 2021–2023.
- Kartodihardjo, H. (2021). Tata kelola hutan di era otonomi daerah: Tantangan dan peluang. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 27(1), 15–28. <https://doi.org/10.7226/jmht.27.1.15>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Pearce, D. W., & Turner, R. K. (2020). *Economics of natural resources and the environment*. Johns Hopkins University Press.
- Sari, D. P., & Budiman, A. (2024). Analisis kebijakan alih fungsi lahan dan dampaknya terhadap jasa ekosistem. *Jurnal Ekonomi Lingkungan*, 18(2), 45–62.
- United Nations Environment Programme. (2024). *Global environment outlook 2024: Environmental challenges and opportunities*.
- Walhi. (2023). Laporan pemantauan: Implementasi analisis dampak lingkungan di Indonesia.
- Zhang, L. (2023). Digital technology in environmental monitoring: IoT and big data applications. *Environmental Technology & Innovation*, 29, 103–118. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2023.103118>

Belajar dari Sarimukti: Politik Ekologi Pengelolaan Sampah dan Urgensi Keadilan Lingkungan

Ditulis oleh: Diexy Inkha Pradana

Dari 625 sungai yang dipantau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun lalu, 375 di antaranya tergolong tercemar berat, 187 sungai mengalami pencemaran sedang, sedangkan sisanya berada dalam kondisi cemar ringan hingga baik. Data ini merupakan potret nyata bagaimana kondisi lingkungan hidup Indonesia menghadapi krisis yang multidimensional. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pernah menyoroti urgensi perlindungan ekosistem sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Namun, realitanya banyak praktik eksploitatif yang masih terjadi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Sebuah kasus konkret terjadi pada Sungai Brantas yang mengalami pencemaran masif akibat limbah industri dan domestik. Mahkamah Agung bahkan memerintahkan Pemerintah Jawa Timur untuk memasang CCTV dan alat pemantau kualitas air secara real-time. "Ini bukan sekadar masalah pencemaran lokal, tetapi cerminan sistemik dari lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Jika degradasi ekosistem terus dibiarkan, daya dukung lingkungan untuk generasi mendatang akan hancur,"

Pendahuluan: Ironi Sampah di Hari Lingkungan Hidup

Mahatma Gandhi, pernah mengingatkan kita, "The Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed." Kutipan ini menggarisbawahi kebenaran fundamental, bahwa alam semesta sesungguhnya telah menyediakan sumber daya yang cukup, untuk memenuhi kebutuhan setiap dari kita. Namun, akar dari banyaknya kerusakan lingkungan, termasuk masalah sampah hari ini, seringkali bukanlah terletak pada pemenuhan kebutuhan tersebut, melainkan pada keinginan tak terbatas untuk mengakumulasi, jauh melampaui apa yang manusia perlukan. Kecerakahan yang mendorong sistem yang tidak berkelanjutan, mengabaikan daya dukung lingkungan, dan membebani bumi dengan limbah yang tak terkendali.

Ironisnya, di tengah peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang kita rayakan di bulan Juni ini, bayang-bayang "keserakahan" sistemik tersebut masih begitu nyata. Di berbagai sudut negeri, Indonesia masih bergelut hebat dengan persoalan sampah, dan salah satu wajah paling simbolik, adalah TPA Sarimukti yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Lebih dari sekadar tempat pembuangan, Sarimukti adalah cermin besar yang memantulkan kompleksitas persoalan sampah, dari teknis hingga yang paling mendasar, konteks politik dan keadilan, yang berakar dari sistem yang lebih mengutamakan pertumbuhan tak terbatas, ketimbang pemenuhan kebutuhan ekologis dan sosial.

Tulisan ini tidak bermaksud menambah daftar keluhan atas kondisi Sarimukti hari ini. Sebaliknya, tulisan ini merupakan sebuah ajakan untuk "belajar dari Sarimukti". Dengan menggunakan lensa ekologi politik dan taksonomi keadilan lingkungan, kita akan membedah bagaimana Sarimukti bukan hanya produk dari keputusan teknis, melainkan juga arena pertarungan kepentingan dan manifestasi ketidakadilan. Dari pelajaran ini, kita berharap dapat merumuskan urgensi dalam tata kelola sampah nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan, sebagai sebuah agenda mendesak bagi Bangsa Indonesia.

Sarimukti: Potret Masalah yang Jauh Lebih Dalam dari Sekadar Sampah

Secara kasat mata, TPA Sarimukti yang melayani kebutuhan pengelolaan sampah dari wilayah Bandung Raya, dapat dilihat sebagai hamparan sampah yang menggunung. Aroma menyengat yang terbawa angin, pemandangan truk pengangkut sampah yang antre mengular, dan potensi longsor sampah yang menghantui, adalah realitas sehari-hari. Kejadian darurat sampah yang berulang melanda Bandung Raya, dengan Sarimukti sebagai titik tumpunya, menjadi bukti rapuhnya sistem pengelolaan sampah yang ada. Memori kebakaran gunung sampah yang menghasilkan kepulan asap beracun, adalah sekelumit dampak ekologis yang nyata.

Namun, jika kita berhenti pada deskripsi fisik dan dampak lingkungan semata, kita akan kehilangan esensi permasalahan. Sarimukti adalah simpul dari berbagai masalah struktural sekaligus wajah dari kebijakan pengelolaan sampah yang seringkali bersifat top-down dan cenderung

mengabaikan aspek sosial-ekologis berkelanjutan. Masyarakat yang tinggal di sekitar Sarimukti misalnya, bukan hanya terpapar risiko kesehatan dan penurunan kualitas lingkungan. Mereka juga kerap merasakan marginalisasi, di mana ruang hidup mereka dikorbankan demi “kepentingan yang lebih besar”, namun tanpa kompensasi atau pelibatan yang adil dan memadai. Keluhan mereka seringkali hanya dianggap sebagai angin lalu, atau lebih buruk lagi, sebagai penghambat pembangunan. Inilah yang menandakan bahwa di balik persoalan teknis sampah Sarimukti, tersimpan isu fundamental terkait kuasa dan keadilan.

Membongkar Lapisan Kepentingan: **Lensa Ekologi Politik Sampah di Sarimukti**

Untuk memahami akar masalah Sarimukti, kita perlu meminjam kacamata ekologi politik. Ekologi politik, secara sederhana, adalah studi tentang bagaimana kekuasaan yang dalam berbagai bentuknya, memengaruhi akses, kontrol, dan distribusi sumber daya alam serta dampak lingkungan. Ekologi politik cenderung mempertanyakan banyak hal: siapa yang membuat keputusan terkait lingkungan? Untuk kepentingan siapa? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Dan mengapa demikian?

Dalam konteks Sarimukti, pendekatan ekologi politik membantu kita melihat bahwa pemilihan lokasi, teknologi yang digunakan, skema pengelolaan, hingga penanganan dampak, tidaklah terjadi dalam ruang hampa politik. Keputusan-keputusan tersebut adalah hasil dari tarik-menarik kepentingan antara berbagai aktor, seperti jajaran pemerintah, pengguna jasa TPA, pihak swasta, dan tentu saja masyarakat lokal.

Sebagai contoh, keputusan pemilihan lokasi Sarimukti sendiri, lahir dari rahim urgensi pasca-tragedi Leuwigajah. Dalam situasi genting tersebut, hak masyarakat lokal, acapkali teredam oleh kepentingan teknokratis dan tekanan politik untuk solusi instan dari entitas pemerintahan yang berkuasa lebih besar. Ruang hidup mereka dinegosiasikan, seringkali tanpa posisi tawar yang setara, demi kebutuhan wilayah perkotaan yang lebih dominan.

Demikian pula dalam pemilihan teknologi pengelolaan sampah. Janji akan modernitas dan efisiensi seringkali harus tunduk pada realitas keterbatasan anggaran dan kapasitas operasional. Tak jarang, proses ini juga diwarnai

oleh kepentingan penyedia teknologi, sementara kajian mendalam mengenai risiko jangka panjang dan kesesuaian dengan konteks lokal bagi masyarakat rentan, kurang menjadi prioritas utama. Teknologi menjadi arena kompromi, di mana aspek keberlanjutan ekologis dan sosial bisa jadi terpinggirkan.

Lebih lanjut, skema pengelolaan sampah di Sarimukti, menjadi cermin nyata fragmentasi kepentingan antar pemerintah. Tarik-ulur terkait pembagian tanggung jawab pendanaan dan koordinasi operasional, seringkali mengorbankan kualitas pengelolaan itu sendiri. Akibatnya, TPA yang diharapkan menjadi solusi justru kerap menjadi sumber masalah baru, sementara aktor informal seperti pemulung yang sebenarnya berkontribusi dalam rantai daur ulang, tetap berada dalam posisi marginal.

Pada akhirnya, hak masyarakat untuk menuntut keadilan atas lingkungan hidup, seringkali hanya dijawab dengan solusi-solusi parsial. Kompensasi sesaat mungkin diberikan, namun jarang sebanding dengan degradasi kualitas hidup jangka panjang yang dialami. Respons negara dalam hal ini, kerap menunjukkan bagaimana pertimbangan anggaran dan upaya menjaga citra, bisa lebih dominan ketimbang pemenuhan hak dasar warganya.

Dengan demikian, ekologi politik mengungkap bahwa “masalah sampah” di Sarimukti bukanlah sekadar soal kapasitas atau teknologi yang kurang memadai. Ia adalah cerminan dari bagaimana kekuasaan dinegosiasikan, seringkali dengan mengorbankan kelompok yang paling rentan dan lingkungan itu sendiri. Solusi yang hanya bersifat teknis, tanpa menyentuh akar politik, hanya akan menjadi solusi tambal sulam yang bersifat sementara.

Keadilan Lingkungan yang Terampas di Khaki Gunung Sampah Sarimukti

Berangkat dari ekologi politik, isu berikutnya yang krusial adalah keadilan lingkungan. Keadilan lingkungan menuntut hak semua orang, tanpa memandang apapun itu, untuk hidup di lingkungan yang sehat dan aman, serta terlibat secara bermakna dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi lingkungan mereka. Dalam konteks Sarimukti, setidaknya ada tiga dimensi keadilan lingkungan yang patut kita soroti.

Pertama, **keadilan distributif**, yang mempertanyakan bagaimana beban dan manfaat lingkungan didistribusikan. Jelas terlihat bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar Sarimukti menanggung beban lingkungan yang tidak proporsional, mulai dari risiko penyakit akibat pencemaran, penurunan nilai tanah, hingga hilangnya kenyamanan hidup. Sementara itu, manfaat dari adanya Sarimukti, lebih banyak dinikmati oleh masyarakat perkotaan yang jauh dari lokasi TPA.

Kedua, **keadilan prosedural**, yang menekankan pada hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pertanyaannya, sejauh mana masyarakat sekitar Sarimukti dilibatkan secara aktif dan bermakna dalam perencanaan, operasional, dan pengawasan TPA? Apakah suara mereka didengar dan dipertimbangkan secara serius, ataukah partisipasi hanya bersifat formalitas untuk memenuhi syarat administratif? Ketiadaan prosedur yang adil seringkali berujung pada kebijakan yang merugikan dan memicu konflik.

Ketiga, **keadilan pengakuan**, yang menuntut pengakuan dan penghormatan terhadap identitas, budaya, pengetahuan lokal, dan pengalaman hidup kelompok-kelompok yang terdampak. Seringkali, masyarakat lokal yang menyuarakan keprihatinan atas dampak TPA dicap sebagai anti-pembangunan atau tidak kooperatif. Padahal, mereka memiliki pengetahuan lokal tentang lingkungan mereka yang bisa jadi sangat berharga. Pengabaian terhadap dimensi pengakuan ini melanggengkan marginalisasi dan ketidakadilan.

Ketika ketiga dimensi keadilan ini terabaikan, maka TPA Sarimukti bukan hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga menjadi monumen ketidakadilan lingkungan.

Pelajaran dari Sarimukti: Merajut Ulang Tata Kelola Sampah Nasional yang Berkeadilan

Kasus Sarimukti, dengan segala kompleksitas ekologi politik dan defisit keadilan lingkungannya, menawarkan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam upaya membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Bukan hanya soal Bandung Raya, tetapi cerminan dari persoalan yang dihadapi banyak daerah lain.

Pertama, kita harus mengakui bahwa pengelolaan sampah adalah isu yang sarat muatan politik, bukan sekadar teknis. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan haruslah akuntabel dan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi publik, terutama kelompok rentan. Relasi kuasa yang timpang haruslah dikoreksi.

Kedua, prinsip keadilan lingkungan harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan praktik pengelolaan sampah, untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang menanggung beban lingkungan secara tidak adil, menjamin keterlibatan yang bermakna, dan menghargai martabat setiap warga negara.

Ketiga, sudah saatnya Indonesia bergeser dari paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada TPA (end-of-pipe solution). Upaya pengurangan sampah dari sumbernya (reduce, reuse, recycle), pengembangan ekonomi sirkular, dan pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis komunitas harus menjadi prioritas nasional. TPA seharusnya menjadi opsi terakhir, bukan yang utama, dan itupun harus dikelola dengan standar lingkungan dan sosial tertinggi.

Urgensi untuk menerapkan pelajaran ini semakin mendesak. Dengan pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi, volume sampah akan terus meningkat. Jika kita tidak melakukan perubahan fundamental, maka "Sarimukti-Sarimukti" baru akan terus bermunculan di berbagai penjuru negeri, melanggengkan krisis ekologis dan ketidakadilan sosial.

Penutup: Dari Sarimukti untuk Indonesia yang Lebih Adil dan Lestari

Kembali ke semangat Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kasus TPA Sarimukti adalah pengingat keras bahwa tanggung jawab kita tidak berhenti pada membuang sampah pada tempatnya. Ada tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan bahwa sistem yang kita bangun tidak menciptakan korban dan tidak merusak masa depan. Belajar dari Sarimukti berarti memahami bahwa di balik setiap tumpukan sampah, ada cerita tentang kekuasaan, kepentingan, dan keadilan yang dipertaruhkan.

Semoga, pelajaran dari Sarimukti ini dapat menginspirasi kita semua, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan individu, untuk bersama-sama mendorong terwujudnya tata kelola sampah yang tidak hanya efektif

secara teknis, tetapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis. Karena lingkungan yang sehat dan adil adalah hak setiap anak bangsa, di Sarimukti, di Sulawesi Selatan, dan di seluruh pelosok Indonesia.

Menolak Tambang, Menjaga Warisan: Perlawanan Ekologis Batu Beriga

Ditulis oleh: Randi Syafutra

Di ujung timur Pulau Bangka, tersembunyi sebuah desa pesisir yang memiliki lanskap menakjubkan dan budaya yang kaya: Batu Beriga. Terletak di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, desa ini tampak seperti serpihan surga yang tertinggal di tengah pusaran modernisasi dan eksploitasi sumber daya alam. Laut yang memeluknya dari tiga sisi menjadi sumber kehidupan, identitas, dan spiritualitas masyarakatnya. Namun, keindahan itu kini diganggu oleh bayang-bayang tambang timah yang mengintai dari perairan sekitar, menyulut amarah, kecemasan, dan perlawanan masyarakat lokal.

Dalam narasi besar tentang lingkungan hidup Indonesia, Batu Beriga bukan hanya satu cerita kecil dari sudut pesisir Bangka Belitung. Ia adalah potret jujur tentang ketegangan antara pembangunan dan pelestarian, antara korporasi dan komunitas, antara kepentingan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Dan yang lebih menyakitkan: antara suara masyarakat dan kekuasaan yang kerap membungkamnya.

Masyarakat Batu Beriga bukan masyarakat yang menolak pembangunan. Mereka bukan anti-kemajuan. Tapi mereka paham benar bahwa kemajuan sejati tidak datang dengan menggali tanah dan laut hingga kering, lalu meninggalkan luka yang tak tersembuhkan. Mereka percaya pada pembangunan yang berdamai dengan alam, seperti yang diwariskan oleh tradisi Taber Laot—ritual sakral tahunan di mana laut “dikunci” selama tiga hari untuk memberi waktu bagi ekosistemnya beristirahat dan pulih.

Taber Laot bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk eco-spirituality yang

menyatu dalam keseharian masyarakat pesisir. Ritual ini adalah representasi dari kearifan lokal yang memahami konsep keberlanjutan jauh sebelum kita mengenal istilahnya dalam bahasa modern. Di masa ketika manusia saling berlomba mengeksploitasi alam, masyarakat Batu Beriga justru mempraktikkan konservasi secara turun-temurun. Laut tidak hanya dilihat sebagai sumber ekonomi, tetapi sebagai ruang hidup, ruang suci, dan warisan yang harus dijaga untuk anak cucu mereka.

Namun, mimpi indah tentang laut yang sehat dan kehidupan yang lestari terus digerus oleh ambisi industri pertambangan timah. PT Timah Tbk, salah satu BUMN yang diberikan mandat untuk mengelola kekayaan alam bangsa, berencana menambang di perairan Batu Beriga. Rencana ini langsung memantik perlawanan warga. Mereka khawatir tambang akan menghancurkan ekosistem laut yang selama ini menopang kehidupan sebagai nelayan. Mereka takut bahwa pasir timah yang dikeduk hari ini akan membawa lumpur penderitaan di hari esok.

Penolakan warga Batu Beriga bukan tanpa dasar. Pengalaman di banyak tempat menunjukkan bahwa eksploitasi timah di laut membawa dampak buruk yang jauh melebihi manfaat ekonominya. Pulau Bangka dan Belitung telah lama menjadi saksi bisu kehancuran ekologis akibat penambangan timah, baik di darat maupun di laut. Lubang-lubang bekas tambang menganga seperti luka yang tak kunjung sembuh, merusak bentang alam dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Air menjadi keruh, habitat ikan lenyap, dan mata pencaharian tradisional tergerus habis.

Ironisnya, masyarakat Batu Beriga merasa tidak pernah dilibatkan secara layak dalam proses perizinan penambangan. Dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan bahwa masyarakat adat dan lokal memiliki hak atas wilayah pesisir yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Namun dalam praktiknya, suara mereka justru diabaikan. Pemerintah dan perusahaan justru lebih mendengar bisikan kepentingan ekonomi jangka pendek, ketimbang teriakan warga yang menggantungkan hidup pada laut yang bersih.

Penolakan itu bahkan berujung pada aksi protes besar yang nyaris anarkis

ketika PT Timah menggelar sosialisasi penambangan. Suara nelayan, ibu-ibu, dan pemuda Batu Beriga menggema dalam satu tekad: tolak tambang laut. Mereka tahu, jika laut rusak, maka lenyap pula masa depan. Bahkan generasi muda yang belum banyak mengenal politik, kini menjadi barisan terdepan dalam perjuangan menyelamatkan tanah dan laut leluhur mereka. Sayangnya, perjuangan mereka masih harus berhadapan dengan kekuatan besar: aliansi antara negara dan korporasi. Dalam kasus skandal korupsi lingkungan yang pernah mengemuka di Bangka Belitung, PT Timah Tbk dan beberapa perusahaan swasta diduga terlibat dalam praktik-praktik pengelolaan tambang yang melanggar prinsip keberlanjutan. Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan kerugian lingkungan yang ditimbulkan mencapai angka mencengangkan: lebih dari Rp300 triliun. Nilai yang tidak hanya mencerminkan besarnya kerusakan, tetapi juga kelalaian sistemik dalam menjaga warisan alam negeri ini.

Jika tambang di laut Batu Beriga tetap dipaksakan, maka kita hanya akan mengulangi siklus kehancuran yang sama. Seperti yang terjadi di Teluk Kelabat, Sungailiat, dan perairan Belinyu, tambang laut menimbulkan sedimentasi tinggi, memusnahkan terumbu karang, dan merusak jalur migrasi ikan. Tak ada reklamasi yang benar-benar berhasil mengembalikan laut ke kondisi semula. Yang tersisa hanyalah kegersangan, konflik sosial, dan generasi yang kehilangan harapan.

Batu Beriga bukan hanya medan perjuangan ekologi, tetapi juga medan pertempuran nilai. Di satu sisi, ada narasi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pendapatan negara. Di sisi lain, ada narasi kearifan lokal, keberlanjutan, dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Dua narasi ini seharusnya tidak saling bertabrakan, jika negara benar-benar berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan. Namun faktanya, narasi yang terakhir kerap dikorbankan demi angka-angka statistik pertumbuhan yang semu.

Bagi warga Batu Beriga, pilihan mereka jelas: mereka tidak menolak pembangunan, tetapi menolak kehancuran. Mereka ingin hidup berdampingan dengan laut, bukan menggantinya dengan kerukan ponton-ponton tambang. Mereka ingin mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan, memperkuat ekonomi berbasis budaya, dan memperluas akses

infrastruktur tanpa harus menjual tanah dan laut mereka kepada korporasi. Pemerintah seharusnya hadir sebagai penengah yang adil, bukan sebagai fasilitator investasi yang abai terhadap rakyat. Regulasi harus ditegakkan, hak masyarakat harus dihormati, dan suara-suara dari pesisir seperti Batu Beriga harus dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan lingkungan. Jangan sampai negara hanya menjadi “penjaga gerbang” yang membuka pintu bagi investor, tetapi menutup telinga terhadap jeritan nelayan.

Ada banyak cara untuk membangun Indonesia tanpa harus merusak alamnya. Batu Beriga, dengan ritual Taber Laot-nya, telah menunjukkan kepada kita semua bahwa pelestarian dan penghidupan bisa berjalan beriringan. Bahwa spiritualitas dan konservasi bisa bersatu dalam menjaga ekosistem. Bahwa pembangunan bisa dilakukan dari bawah, dengan mendengarkan suara rakyat dan menghormati warisan leluhur.

Kisah Batu Beriga adalah kisah tentang harapan, keberanian, dan perlawanan. Ini bukan hanya tentang satu desa yang menolak tambang, tetapi tentang Indonesia yang sedang mencari arah di tengah persimpangan antara eksploitasi dan keberlanjutan. Batu Beriga mengingatkan kita bahwa di balik deru mesin tambang, masih ada nyanyian laut yang ingin tetap hidup. Dan kita semua bertanggung jawab untuk menjaga agar nyanyian itu tidak berubah menjadi ratapan.

Energi sebagai Komoditas atau Hak

Ditulis oleh: Cucu Cahyanti

Transisi energi dibutuhkan oleh negeri ini sebagai bentuk pertahanan sumber daya alam di dalamnya. Tujuan besar ini perlu diimbangi dengan banyak aspek kehidupan untuk dapat selaras dengan yang alam butuhkan. Namun dalam prakteknya masih banyak menghadapi rintangan. Proses transisi ini bukanlah hal yang mudah, terjadi pro kronta, proses riset dan uji coba, ego dan keserakahan segelintir manusia yang tentu akan merugikan manusia lainnya serta terjadinya kerusakan lingkungan. Masalah lingkungan yang dihadapi ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kita perlu memahami dan menyatukan

tujuan bersama untuk keberlanjutan bumi kita bersama melalui transisi energi yang aman, bersih, dan ramah lingkungan.

Sumber energi bersih yang saat ini mulai dipraktekkan di beberapa tempat yaitu pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sumber daya alam yang digunakan disesuaikan dengan potensi lingkungan pada suatu daerah. Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, memiliki banyak potensi untuk menggunakan sumber energi terbarukan yang bersih. Letak kepulauan Indonesia yang berada pada ring of fire memiliki potensi pemanfaatan menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi dan sudah berjalan di beberapa daerah. Namun beberapa kasus dampak dari kesalahan teknik yang ditimbulkan menyebabkan kerugian bagi manusia maupun lingkungan alam disekitarnya.

Geothermal telah menerangi sejumlah tempat, bahkan di daerah yang sebelumnya belum tersentuh dengan aliran listrik. Isu lingkungan yang ditimbulkan di area geothermal lainnya menyebabkan keringnya lahan pertanian, bau gas belerang, munculnya luapan lumpur panas, seng yang cepat berkarat dsb., potensi kerusakan lingkungan lainnya menimbulkan banyak penolakan dari masyarakat. Seorang masyarakat menyuarakan bahwa energi merupakan hak masyarakat bukan komoditas yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Masyarakat seharusnya dilibatkan dalam mengambil keputusan energi mana yang akan digunakan sehingga selaras dengan adat, budaya, maupun ekonomi daerah tersebut. Oleh karena itu, energi harus dikelola dengan bijak secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat dan masa depan.

Penolakan pembangkit listrik tenaga panas bumi juga terjadi oleh masyarakat lereng Gunung Ciremai, berbagai elemen masyarakat, perempuan dan laki-laki dari berbagai latar belakang dan kepercayaan menyuarakan penolakan tersebut. Proses perencanaan yang kurang terbuka dan transparan ditambah kurangnya edukasi terhadap masyarakat, memicu inisiatif masyarakat untuk melakukan studi banding ke salah satu pembangkit listrik tenaga panas bumi yang telah beroperasi. Berdasarkan hasil studi banding tersebut masyarakat dengan tegas menolak adanya penambangan panas bumi. Hingga perusahaan Amerika yang

memenangkan proyek ini mengundurkan diri kemudian proyek ini dilelang kembali untuk perusahaan Indonesia. Masyarakat lereng Ciremai melakukan penolakan dengan mempertimbangkan aspek kerugian ekologis, sosial, budaya yang menjadi warisan nenek moyang untuk sekarang hingga masa depan.

Pemanfaatan panas bumi ini bukanlah hal sepenuhnya menimbulkan kerugian karena panas bumi menjadi potensi energi terbarukan jika proses pengelolaan mapun pelibatan masyarakat sekitar dilakukan dengan sesuai. Peningkatan proses riset dan pengadaan teknologi untuk meminimalisir kesalahan teknis di lapangan, sosialisasi dan edukasi masyarakat sekitar, analisis dan rencana penanggulangan dampak yang ditimbulkan, pelibatan masyarakat untuk tenaga kerja dll. sehingga dapat dicapainya kesejahteraan. Proses transisi energi ini membutuhkan adaptasi untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatannya dan diterima oleh masyarakat. Kolaborasi dengan berbagai elemen manusia akan mempercepat proses adaptasi transisi energi.

Kampung daulat energi menjadi salah satu strategi transisi energi. Beberapa tokoh masyarakat dengan inisiatif memanfaatkan sumber daya alam di kampungnya dapat menciptakan pembangkit listrik mikro hidro. Kampung mandiri yang tidak bergantung dengan energi kotor menjadi aksi nyata dalam mitigasi krisis iklim. Adapun kisah rumah daulat energi yang menggunakan sampah organik sebagai sumber energi. Sampah organik rumah tangga yang dikelola dengan bijak dapat menghasilkan biogas yang dapat dimanfaatkan untuk sumber api dan mencukupi kebutuhan untuk proses memasak. Gas yang dihasilkan dari pengelolaan sampah juga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Inovasi dan kreativitas bangsa ini penting didorong untuk terus ditingkatkan.

Transisi energi akan mempengaruhi lapangan pekerjaan dimasa depan. Generasi muda perlu disiapkan untuk terlibat dalam green jobs, menerapkan nilai lingkungan untuk keberlanjutan. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan sangat dibutuhkan untuk perkenalkan sejak dini. Rasa cinta lingkungan yang terus dipupuk diimbangi dengan mengasah kemampuan generasi muda diharapkan akan membentuk pemimpin yang berkeadilan ekologis. Proses edukasi lingkungan ini dapat diawali dari

rumah seperti: budaya memilah dan mengelola sampah, mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi yang tidak digunakan, menghabiskan makanan yang telah diambil atau dibeli dsb. akan menjadi kebiasaan dalam sehari-hari. Mengenalkan pentingnya kelestarian lingkungan untuk seluruh makhluk hidup. Di Masa depan dengan target pemerintah untuk energi bersih terbarukan dan net zero emission akan menyerap banyak generasi muda untuk kertibat melalui green jobs.

Dari Tana Luwu hingga Bumi Tepe Asa Maroso: Kisah Warga di Tengah Janji Masa Depan Hijau

Ditulis oleh: Ashar Asis

Langit di atas Bahodopi, Morowali, tak pernah benar-benar biru lagi. Setiap pagi, kabut tipis menyelimuti kampung-kampung pesisir. Bukan embun, melainkan debu halus dari kawasan industri nikel yang berdetak 24 jam sehari.

Di tepi laut, Ibrahim duduk di sampan kayunya, memeriksa jaring-jaring yang digulung longgar. “Sekarang laut seperti diam. Dulu, pagi begini, saya bisa bawa pulang kerapu, kakap, bahkan baronang. Sekarang, jangankan itu—ikan kecil pun sulit,” ujarnya.

Kawasan ini adalah rumah bagi Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), pusat pemurnian dan pengolahan nikel terbesar di Asia Tenggara. Berbagai perusahaan tambang dan smelter, sebagian besar dari Tiongkok, beroperasi di bawah satu naungan raksasa industri yang dijanjikan pemerintah sebagai jantung ekonomi hijau Indonesia. Nikel dari sini akan jadi baterai mobil listrik, simbol masa depan yang lebih bersih.

Namun bagi warga Morowali, masa depan itu terasa semakin kotor. Laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah pada 2023 menyebutkan bahwa lebih dari 1.000 kasus ISPA tercatat di Puskesmas Wosu pada tahun 2022, meningkat tajam setelah perluasan smelter dan PLTU batu bara di kawasan IMIP. Penelitian oleh Puspita et al. (2022) menunjukkan kandungan partikulat (PM2.5) di kawasan industri melebihi ambang aman WHO, memicu gangguan pernapasan pada anak-anak.

Tak hanya udara, laut pun berubah. Studi oleh Hutasoit & Santoso (2023) mencatat peningkatan kadar logam berat seperti nikel dan mangan di pesisir Bahodopi. Ini berdampak langsung pada biota laut dan kesehatan masyarakat pesisir, yang sebagian besar bergantung pada tangkapan ikan harian.

Morowali bukan satu-satunya. Sekitar 400 kilometer ke utara, Luwu Timur menghadapi masalah yang serupa, meski lebih tersembunyi di balik hijaunya pepohonan.

Danau Towuti, danau purba berumur jutaan tahun yang menjadi habitat ikan endemik seperti *Glossogobius matanensis* dan *Telmatherina antoniae*, kini mulai berubah warna. Warga melaporkan air mulai keruh, dasar danau berlumpur, dan populasi ikan menurun.

“Airnya sekarang seperti air cucian beras. Kadang berlendir, apalagi saat hujan,” kata Jemi, nelayan di Desa Pasi-pasi.

Berdasarkan riset oleh Nugroho et al. (2020), aktivitas tambang nikel di sekitar Danau Towuti, terutama oleh PT Vale dan perusahaan lain di Blok Tanamalia, meningkatkan laju sedimentasi dan risiko kontaminasi logam berat. Kajian yang sama menyebutkan bahwa wilayah tangkapan air (catchment area) danau kini mengalami deforestasi cepat.

Konflik sosial pun muncul. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan LBH Makassar melaporkan bahwa perluasan konsesi pertambangan menyingkirkan lahan-lahan milik masyarakat adat Karonsie Dongi. Mereka tergusur tanpa konsultasi berarti, dan kini tinggal di zona penyangga tambang yang rawan longsor dan kekeringan.

Di dua wilayah ini—Morowali dan Luwu Timur—terlihat pola serupa: sumber daya dikeruk demi target global “net zero emissions”, tetapi jejak karbon dan kerusakan justru menumpuk di kampung-kampung yang ditinggalkan dalam diam.

Dr. Rahmawati, pakar ekologi politik dari Universitas Tadulako, menulis bahwa “transisi energi tanpa keadilan ekologis hanya akan menciptakan bentuk kolonialisme baru—di mana tanah dijarah, masyarakat didiamkan, dan alam dikorbankan atas nama perubahan iklim.”

Tapi di tengah semua itu, suara-suara perlawanan tetap terdengar. Warga, aktivis, dan komunitas lokal membentuk jaringan informasi, melakukan advokasi hukum, dan mengumpulkan data kualitas air dan udara secara mandiri. Di Luwu Timur, Forum Towuti Lestari mulai bekerja sama dengan universitas lokal untuk memantau perubahan danau secara berkala.

“Kalau kami diam, siapa lagi yang akan jaga?” ujar Jemi, sambil menepuk permukaan danau yang semakin hangat. Demikian pula disampaikan oleh Ibrahim “Kalau laut rusak dan hutan habis, apa yang akan kami wariskan ke anak cucu?”.

Dari Tana Luwu hingga Bumi Tepe Asa Maroso, semoga hidup yang diharap bersih, tidak berasal dari mengotori.

Darush Shalihah Eco Warrior: Mengintegrasikan Pendidikan Islam dan Pengelolaan Sampah berbasis Keberlanjutan

Ditulis oleh: Ashar Asis

Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan basis bagi pengajaran dan internalisasi ajaran-ajaran Islam. Sejak lama pesantren mengemban sejarah panjang, terutama pada konteks Indonesia. pesantren terkenal tidak hanya sebagai basis pengajaran nilai-nilai keislaman melainkan juga perlawanan terhadap penjajah. Namun, di era sekarang fungsinya sebagai basis perlawanan terhadap penjajah tidaklah relevan. Pada konteks hari ini pondok dituntut untuk tidak hanya menjadi basis penanaman nilai-nilai keislaman, melainkan juga penerapannya.

Pondok pesantren memiliki tanggung jawab untuk menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada bab menjaga lingkungan. Ajaran-ajaran Islam pada dasarnya memang sangat dekat dengan isu mengenai lingkungan. Hal ini tentu tak lepas dari peran manusia sebagai penjaga bumi atau khalifah fi lard. Manusia bertugas untuk menjaga bumi dan segala isi yang ada di dalamnya. Tentu saja tantangan ini

menjadi isu tersendiri bagi lembaga seperti pondok pesantren dalam menerapkan nilai-nilai keislaman. Apalagi pada konteks wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta isu mengenai lingkungan menjadi permasalahan yang cukup pelik.

Isu-isu lingkungan yang berkembang di masyarakat ini sedikit banyaknya juga menjadi permasalahan bagi pondok pesantren, selaku lembaga yang mengedepankan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang sudah mulai dilakukan oleh Pondok Pesantren Darush Shalihah. Sejak beberapa tahun 2019 secara konsisten dan berkelanjutan Pondok Pesantren Darush Shalihah ini menerapkan pola pengolahan sampah secara berkelanjutan. Tulisan ini akan mengulas tentang bagaimana Pondok Pesantren Darush Shalihah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pengolahan sampah berkelanjutan.

Ajaran Islam tentang Lingkungan dan Keberlanjutan

Ajaran Islam sejatinya merupakan sebuah ajaran yang menyeluruh dan menyentuh setiap seluk-beluk kehidupan manusia. Salah satu permasalahan yang seringkali dikaitkan berkaitan dengan menjaga lingkungan adalah tugas manusia sebagai khalifah di dunia. Manusia bertugas untuk menjadi pemimpin di dunia. Tak hanya memimpin, melainkan juga menjaga dan melestarikannya. Seorang manusia dituntut untuk bisa mewariskan kehidupan yang dijalani kepada generasi selanjutnya. Sebagai seorang muslim menjaga kelestarian lingkungan merupakan sebuah kewajiban. Seorang muslim, dituntut harus bisa menerapkan secara kaffah atau menyeluruh. Oleh karena itulah Islam memberikan tempat dalam hal menjaga lingkungan demi keberlanjutan di masa depan.

Mengutip dari buku, "Agama, Kearifan Lokal dan Konservasi Lingkungan" (2024), terdapat dua tokoh yang terkenal dengan konsep mengenai agama dalam kearifan lingkungan ini, yaitu Hosseiu Nasr dan Ziauddin Sardar. Keduanya berperan penting dalam peningkatan kesadaran-kesadaran dunia Islam tentang krisis-krisis lingkungan. Mereka melihat bagaimana Islam dan lingkungan dapat menjadi sebuah solusi bagi permasalahan lingkungan. Konsep ini sangat erat dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi yang perannya tidak hanya sebagai pemimpin melainkan

penjaga bumi secara spesifik pada aspek lingkungan.

Selain dari konsep ekoteologi di dalam Islam juga dikenal dengan konsep al-mizan atau menjaga keseimbangan. Konsep ini amat erat dengan etika menjaga lingkungan. Selaras dengan Surah Ar-Rahman (55:7-8), Allah menegaskan bahwa langit telah ditinggikan dan keseimbangan ditetapkan agar manusia tidak merusaknya. Melalui konsep ini saja kita sudah diberikan gambaran bagaimana sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk menjaga lingkungan dan keseimbangan kehidupan di muka bumi.

Mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh Ayu Hafidhoh dan Suhadi yang berjudul, "Being Santri in Eco-Socialist Way: A Case Study of Pesantren Ekologi Misykat Al-Anwar" (2024), Perjumpaan antara tradisi Islam dan pemikiran modern memberikan perspektif baru dalam adaptasi dan inovasi. Pada konteks ini salah satu lembaga yang sudah menerapkan konsep pesantren dengan mengintegrasikan antara nilai-nilai Islam dan lingkungan adalah Pondok Pesantren Ekologi Misykat Al-Nawar, di Bogor. Pondok pesantren ini menerapkan prinsip-prinsip ekologi pada konteks mulai dari kurikulum, praktek sehari-hari, hingga filosofis pesantren.

Darush Shalihah dengan Gerakan Eco Warrior

Mengutip dari situs, <https://www.unesco.org>, lembaga pendidikan memang menjadi salah satu sarana yang efektif dalam urusan pembangunan berkelanjutan terutama yang berkaitan dengan lingkungan. UNESCO sendiri memiliki program yang berkaitan dengan ini yang dikenal dengan Education for Sustainable Development (ESD). Konsep ini merupakan upaya untuk mengintegrasikan antara pendidikan dengan pembangunan berkelanjutan baik dari aspek ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Pendidikan menjadi pendorong bagi masyarakat dalam rangka menciptakan masa depan yang lebih baik.

Pondok pesantren yang merupakan sebuah komunitas pendidikan memiliki posisi yang cukup penting terutama dalam mengkampanyekan isu-isu mengenai lingkungan, terutama yang selaras dengan ajaran-ajaran Islam. Pondok pesantren tidak hanya mampu memberikan pemahaman, melainkan aspek keterampilan, nilai, sikap dan perilaku menjaga lingkungan yang baik. Konsep-konsep inilah yang kemudian berusaha untuk diterapkan

oleh Pondok Pesantren Darush Shalihat berkaitan dengan gerakan eco warrior.

Mengutip dari situs, <https://dictionary.cambridge.org>, Eco warrior adalah istilah untuk orang-orang yang menentang dan mencoba menghentikan kegiatan yang merusak lingkungan. Orang-orang yang disebut eco warrior ini adalah mereka yang peduli terhadap lingkungan dan beraksi dalam menjaga lingkungan. Beberapa aksi yang mereka lakukan adalah berfokus pada pengurangan penggunaan sampah plastik, menghemat air, melindungi satwa liar hingga melakukan daur ulang.

Menurut wawancara yang dilakukan terhadap salah satu alumni Pondok Pesantren Darush Shalihat bernama Mega pada 7 April 2025, program ini sudah mulai berjalan sejak tahun 2019. Program pengelolaan sampah ini sendiri dilakukan dalam rangka untuk mengurangi dan mengelolah sampah secara berkelanjutan. Konsep ini memberikan pandangan bahwa sampah yang dihasilkan dari proses sehari-hari dapat diolah kembali. Jika akan dibuang pun sampah-sampah tersebut dapat diolah kembali. Pada awalnya program ini, pada masa awal-awal penerapan program, jenis sampah yang baru diolah hanya sekitar belasan jenis sampah, namun dalam perkembangannya jenis-jenis sampah itu menjadi lebih banyak.

Mengutip dari situs <https://greennetwork.id>, Proses pengolahan sampah di Pondok Pesantren Darush Shalihat dimulai dari memilah sampah menjadi 27 jenis sampah. Proses pengolahan ini kemudian diserahkan kepada lembaga daur ulang hingga dua kali seminggu. Unikny lagi program mengenai pengolahan sampah ini akan mulai dibekali sejak masa orientasi ketika santri baru masuk. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman awal mengenai dasar-dasar sebelum mereka menerapkannya. Pada sesi orientasi ini juga para santri akan dibekali dengan praktek secara langsung. Kemudian ketika sudah secara resmi menjadi bagian dari santri mereka wajib untuk menjalankan tugasnya mulai dari pemilahan, pencucian, hingga proses penjemuran sampah.

Ketika program ini dilakukan, para santri tidak hanya mendapatkan program sosialisasi saja, melainkan hingga kemana saja sampah tersebut kemudian diolah. Misalnya saja setelah diterima menjadi bagian dari Pondok Pesantren Darush Shalihat para santri akan mendapatkan program

kunjungan ke beberapa tempat pengelolaan sampah yang ada di Yogyakarta. Tak hanya itu, para santri juga akan diberikan edukasi dari ahli zero waste hingga lembaga-lembaga pendidikan yang sudah berhasil menerapkan praktek pengelolaan sampah.

Program pengolahan sampah yang diimplementasikan oleh Pondok Pesantren Darush Shalihat ini juga faktanya melibatkan serta masyarakat sekitar. Misalnya dalam perayaan 17 Agustusan di Pogung, Yogyakarta, santri dari Pondok Pesantren Darush Shalihat melakukan program edukasi tentang pentingnya memilah sampah dan cara membuangnya ke tempat yang telah disediakan. Tak hanya itu, acara kemudian dilanjutkan dengan program pemilahan sampah. Program ini pun tak hanya berkaitan dengan program pemilahan, melainkan juga program-program untuk mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan sampah plastik.

Jika mengacu konsep eco warrior Pondok Pesantren Darush Shalihat bersama dengan santri-santrinya telah menjadi para aktivis lingkungan yang membantu menjaga lingkungan melalui program pengelolaan sampah berkelanjutan yang digagas oleh UNESCO. Pondok Pesantren Darush Shalihat secara konsisten menanamkan nilai-nilai keislaman mengenai isu-isu lingkungan, termasuk masalah pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Program pengelolaan sampah di Darush Shalihat ini memang menemui tantangan terutama berkaitan dengan konsistensinya penerapannya. Memang pada awalnya program ini cukup membutuhkan waktu karena harus memilah 27 jenis sampah, namun dengan penerapan tersebut para santri dapat lebih menyadari pentingnya pengelolaan sampah ini.

Namun, meskipun sudah menerapkannya selama beberapa tahun program pengelolaan sampah ini masihlah harus terus dikembangkan secara terus-menerus. Program ini memang cocok jika diterapkan pada skala-skala kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun, perlu dikaji dan dievaluasi kedepan apakah memungkinkan untuk diterapkan secara menyeluruh pada konteks yang lebih luas.

Dampak dan Potensi Penerapan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Program yang telah berjalan selama beberapa tahun ini memberikan dampak yang positif. Santri yang telah mengikuti program ini terbukti berhasil dalam membangun kesadaran dalam mengelola sampah. Tak hanya itu, program yang ditujukan bagi para santri di Pondok Pesantren Darush Shalihat ini juga diharapkan dapat menjadi percontohan bagi masyarakat yang lebih luas. Hanya melalui program pada tingkat mikro seperti inilah kita bisa memulai perubahan.

Saat ini secara konsisten Pondok Pesantren Darush Shalihat memberikan kontribusi dan pengenalan mengenai program-program pengenalan pengelolaan sampah ke entitas yang lebih luas kepada masyarakat luas. Program ini memang sudah mulai dikenalkan kepada masyarakat sekitar, namun masih membutuhkan evaluasi jika diterapkan pada konteks yang lebih luas. Apalagi, jika melihat dari program yang ada membutuhkan ketekunan dan konsistensi dalam penerapannya.

Kesimpulan

Pondok Pesantren Darush Shalihat menunjukkan bahwa pendidikan Islam dapat diintegrasikan secara nyata dengan praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui konsep eco warrior. Dengan mengusung konsep khalifah fil ardh dan Al-mizan dalam ajaran Islam, pesantren ini tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai ekologis dalam kehidupan sehari-hari para santri. Program pengelolaan sampah yang dimulai sejak orientasi hingga kegiatan rutin memilah 27 jenis sampah, menjadi bentuk nyata penerapan ajaran Islam dalam menjaga bumi. Melalui pendekatan ini, para santri tidak hanya belajar tentang tanggung jawab keagamaan, tetapi juga membentuk kesadaran ekologis yang mendalam. Keterlibatan masyarakat sekitar dan kerja sama dengan lembaga luar semakin memperkuat dampak sosial dari program ini. Meskipun program ini masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi dan skalabilitas, keberhasilannya di tingkat mikro membuka peluang untuk dijadikan model bagi lembaga pendidikan lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahkan secara nasional. Dengan demikian, Darush Shalihat telah memperlihatkan bahwa pesantren dapat berperan aktif dalam menjawab krisis lingkungan melalui integrasi pendidikan Islam dan gerakan berkelanjutan berbasis komunitas.

Daftar Pustaka

- Jamin, M., Rahayu, S. L., Mulyanto, & Irfan, A. N. (2024). Agama, kearifan lokal dan konservasi lingkungan. Nas Media Pustaka.^r
- Ihsaniyah, A. H. (2024). Being Santri in Eco-Socialist Way: A Case Study of Pesantren Ekologi Misykat Al-Anwar (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada).
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/eco-warrior>, diakses pada Senin, 7 April 2025
- <https://greennetwork.id/komunitas/melihat-praktik-pemilahan-sampah-di-pesantren-darush-shalihat-yogyakarta>, diakses pada Senin, 7 April 2025
- <https://www.unesco.org/en/sustainable-development/education>, diakses pada Senin, 7 April 2025

Tanah yang Lelah, Kota yang Buta: Kisah Sunyi dari TPA Antang

Ditulis oleh: A. Rezky Pratama

“Di sudut timur Kota Makassar, tepatnya di Kelurahan Manggala, sebuah luka lingkungan terus menganga—TPA Antang menjadi saksi bisu menumpuknya sampah plastik yang tak lagi sekadar benda tak bernyawa, melainkan ancaman perlahan bagi masa depan. Di balik hiruk-pikuk kota yang terus bergerak, tanah di sana menangis, udara mengeluh, dan air membawa lara yang tak kasat mata.”

A. Pendahuluan

Sampah plastik telah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan hidup, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Sifat plastik yang tidak mudah terurai menyebabkan pencemaran yang berlangsung selama ratusan tahun, mencemari tanah, air, dan udara. Berdasarkan penelitian oleh Jambeck et al. (2015), Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok.

Krisis ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga merambah ke wilayah perkotaan seperti Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Salah satu kawasan yang terdampak parah adalah Kelurahan Manggala, lokasi dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang. Tumpukan sampah plastik di

wilayah ini telah menimbulkan berbagai persoalan lingkungan dan kesehatan. Esai ini akan membahas secara komprehensif akar permasalahan sampah plastik di Makassar, dampaknya, serta solusi dan tantangan dalam pengelolaannya.

B. Pembahasan

Gambaran Masalah

Menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2020), Indonesia menghasilkan sekitar 67,8 juta ton sampah per tahun, dengan 17% di antaranya adalah sampah plastik—sekitar 11 juta ton. Sampah plastik mendominasi jenis sampah yang tidak terurai dan merusak ekosistem dalam jangka panjang.

Di Kota Makassar, menurut Dinas Lingkungan Hidup (2022), produksi sampah harian mencapai 1.000 ton per hari, dan sekitar 15–20% merupakan sampah plastik. Sampah-sampah tersebut sebagian besar ditampung di TPA Antang, Kelurahan Manggala, yang telah beroperasi sejak 1994 dan kini mengalami kelebihan kapasitas.

Kondisi ini menyebabkan keluhan warga sekitar. Menurut laporan Yayasan Peduli Negeri (2021), sekitar 70% warga di sekitar TPA mengalami gangguan pernapasan dan iritasi kulit, yang diduga akibat pencemaran udara dan air dari limbah plastik. Seperti diungkapkan oleh Dr. Siti Mutmainnah (2021), dosen Ilmu Lingkungan Universitas Hasanuddin, “Sampah plastik yang menumpuk tanpa pemilahan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar TPA, termasuk meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan.”

Faktor Penyebab

Berbagai faktor menjadi penyebab utama krisis sampah plastik ini:

1. Perilaku konsumtif masyarakat terhadap produk plastik sekali pakai. Berdasarkan survei dari LIPI (2018), sebanyak 91% masyarakat Indonesia masih menggunakan kantong plastik setiap kali berbelanja, dan hanya 7% yang membawa tas belanja sendiri. Produk sekali pakai

- seperti sedotan, styrofoam, dan kemasan makanan plastik masih digunakan secara luas karena dianggap murah dan praktis.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan dan daur ulang sampah. Menurut laporan KLHK (2020), dari total sampah yang dihasilkan, hanya 7,5% yang berhasil didaur ulang, sementara 69% dibuang ke TPA, dan sisanya tercecer di lingkungan. Di Kota Makassar, survei oleh DLH Makassar (2022) menunjukkan bahwa hanya 22% rumah tangga yang memilah sampah sebelum dibuang, menunjukkan masih rendahnya kesadaran ekologis.
 3. Sistem pengelolaan sampah yang belum terpadu dan tidak merata. Meskipun ada inisiatif seperti Bank Sampah dan program TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), namun belum semua kelurahan di Makassar memiliki akses ke fasilitas ini. Menurut DLH Makassar, hanya 43 dari 153 kelurahan (per 2022) yang memiliki sistem bank sampah aktif, dan sebagian besar berada di pusat kota. Ini membuat kawasan pinggiran seperti Kelurahan Manggala kurang mendapat dukungan teknis untuk memilah dan mengelola sampah.

Upaya dan Solusi

1. Upaya Pemerintah dan Komunitas Lokal

Pemerintah Kota Makassar melalui program Makassar Tidak Rantasa' mengkampanyekan kebersihan lingkungan dan edukasi pemilahan sampah sejak 2015. Beberapa komunitas warga di Kelurahan Manggala membentuk bank sampah berbasis RT, sementara sekolah-sekolah mulai mengajarkan pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Komunitas seperti Makassar Eco Youth dan Mapala UNHAS juga aktif mengedukasi masyarakat melalui kampanye dan aksi lingkungan.

2. Solusi Jangka Panjang: Regulasi Pelarangan Plastik Sekali Pakai

Beberapa daerah di Indonesia telah mulai menerapkan regulasi pelarangan plastik sekali pakai dan dapat dijadikan acuan oleh Kota Makassar, seperti

3. Bali (Pergub Bali No. 97 Tahun 2018): Melarang penggunaan kantong plastik, sedotan, dan styrofoam. Sejak diterapkan, konsumsi kantong plastik di supermarket Bali turun hingga 80%

(KLHK, 2020)

DKI Jakarta (Peraturan Gubernur No. 142 Tahun 2019): Melarang penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan, pasar tradisional, dan toko swalayan sejak Juli 2020. Bogor dan Banjarmasin juga telah lebih dulu melarang penggunaan kantong plastik dan berhasil mengurangi volume sampah plastik di sungai dan TP

Kota Makassar dapat menjadikan kebijakan tersebut sebagai best practice, disesuaikan dengan kondisi lokal. Selain itu, dukungan dari industri untuk mengembangkan produk ramah lingkungan dan pemberian insentif kepada pelaku usaha yang mengurangi limbah plastik juga merupakan langkah penting.

4. Penguatan Infrastruktur dan Edukasi Berkelanjutan

Solusi lain yang harus dilakukan adalah penambahan fasilitas pengolahan sampah terpadu, perluasan TPS 3R, dan penguatan kurikulum lingkungan hidup di sekolah. Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi bank sampah berbasis insentif (contohnya KitaSampah, Octopus) dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Tantangan yang Dihadapi

Meski sudah ada upaya, masih banyak tantangan. Infrastruktur TPA yang usang, kurangnya armada pengangkut sampah, dan keterbatasan lahan daur ulang menjadi hambatan serius. Selain itu, produk-produk ramah lingkungan belum mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat luas.

Di kawasan sekitar TPA Antang, edukasi belum menjangkau semua lapisan warga. Sebagian masih membakar sampah atau membuangnya ke saluran air karena tidak ada alternatif yang memadai. Tanpa dukungan kebijakan yang tegas dan pengawasan berkelanjutan, upaya-upaya yang ada bisa berhenti di tengah jalan.

C. Penutup

Krisis sampah plastik di Indonesia, khususnya di Kota Makassar, adalah masalah serius yang menuntut perhatian dan aksi kolektif. TPA Antang di

Kelurahan Manggala mencerminkan bagaimana sampah plastik dapat menciptakan beban ekologis dan sosial yang besar jika tidak ditangani dengan baik. Edukasi, perubahan perilaku, dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci penting.

Sebagaimana dikatakan oleh David Suzuki (2009), “We are the environment. Whatever we do to the environment, we do to ourselves.” Maka, menjaga lingkungan adalah menjaga diri kita sendiri dan generasi masa depan. Saatnya Makassar dan Indonesia secara umum bertransformasi menjadi bangsa yang peduli lingkungan. Masa depan bumi—dan manusia—bergantung pada langkah yang kita ambil hari ini.

Daftar Isi

Badan Pusat Statistik. (2023). Makassar dalam angka 2023. BPS Kota Makassar. <https://makassarkota.bps.go.id>

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. (2022). Survei perilaku masyarakat tentang pemilahan sampah rumah tangga di Kota Makassar. Makassar: DLH Kota Makassar.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. (2022). Laporan tahunan pengelolaan sampah Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar.

*Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768–771.*

<https://doi.org/10.1126/science.1260352>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2018). Survei perilaku masyarakat terhadap penggunaan plastik sekali pakai. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, LIPI.

*Mutmainnah, S. (2021). Dampak sampah plastik terhadap kesehatan masyarakat di sekitar TPA. *Jurnal Lingkungan dan Kesehatan*, 7(2), 115–122.*

Pemerintah Provinsi Bali. (2018). Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2019). Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

*Suzuki, D. (2009). *The legacy: An elder's vision for our sustainable future*. Greystone Books.*

Yayasan Peduli Negeri. (2021). Kajian dampak lingkungan dan kesehatan warga sekitar TPA Antang, Makassar. Laporan Internal Yayasan.

Mulai dari Rumah, Menuju Indonesia yang Lebih Hijau

Ditulis oleh: Melbi Tanjung

Pagi itu, setelah mengantar anak dan menata bahan kuliah, saya membuka jendela. Udara masih segar, burung masih bersuara, dan langit tampak cerah. Tapi di balik keindahan yang saya nikmati dari teras rumah, terselip kegelisahan: sampai kapan udara ini akan tetap bersih? Akankah anak-anak saya tumbuh di bumi yang sama ramahnya seperti yang saya rasakan dulu?

Sebagai ibu, saya ingin mereka hidup di lingkungan yang sehat. Sebagai dosen, saya ingin mahasiswa saya tumbuh menjadi agen perubahan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga sadar lingkungan. Dan sebagai warga Indonesia, saya tahu bahwa ini bukan tanggung jawab satu pihak saja.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 ini mengangkat lagi pertanyaan lama yang belum juga kita jawab tuntas: apa arti mencintai bumi dalam tindakan nyata?

Kita sering lupa, bahwa menjaga lingkungan tidak harus dimulai dari aksi besar. Semua bisa dimulai dari kebiasaan kecil. Dan rumah adalah ruang latihan terbaik. Di rumah kami, kami mulai dari hal sederhana seperti membawa tas belanja sendiri, memilah sampah, mengompos sisa organik, membuat ecobrick, mengirim sampah yang tak bisa dikelola ke bank sampah, dan mulai belajar menanam beberapa tanaman untuk kebutuhan dapur. Mungkin terlihat sepele, tapi bagi saya, itu adalah bentuk pendidikan lingkungan yang paling nyata dan paling jujur.

Di kelas, saya selalu menekankan bahwa lingkungan bukan sekadar tema kuliah atau agenda proyek kampus. Lingkungan adalah sistem kehidupan yang juga menghidupi kita. Saat hutan ditebang semena-mena, satwa dan tumbuhan kehilangan habitat karena deforestasi, cuaca tidak menentu, polusi udara di kota-kota besar, bencana alam semakin meningkat, tanah rusak oleh pestisida dan sampah tidak terurai, sungai dan laut penuh limbah plastik dan bahan kimia, hingga es di kutub mencair karena suhu global naik, itu adalah sinyal dari bumi bahwa ada ketidakseimbangan yang kita ciptakan sendiri. Padahal bumi ini diciptakan seimbang. Seperti yang terdapat di

dalam Al-Qur'an tentang keseimbangan:

QS. Ar-Rahman (55): 7-9

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan)

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.

QS. Al-Hijr (15): 19

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَثْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

Kami telah menghamparkan bumi, memancangkan padanya gunung-gunung, dan menumbuhkan disana segala sesuatu menurut ukuran(-nya).

QS. Al-Mulk (67): 3

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ ۗ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۖ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

(Dia juga) yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka, lihatlah sekali lagi! Adakah kamu melihat suatu cela?

Sebagai bangsa yang begitu kaya akan keanekaragaman hayati, Indonesia punya potensi luar biasa untuk menjadi pemimpin dalam upaya pelestarian lingkungan. Tapi potensi itu harus dibarengi dengan kesadaran kolektif. pemerintah, industri, akademisi, rumah tangga, komunitas, semuanya harus bergerak bersama.

Bukan hanya untuk alam, tapi untuk kita semua yang hidup di dalamnya.

Saya percaya, perubahan tidak lahir dari banyaknya kata, tetapi dari kuatnya teladan. Anak-anak tidak belajar mencintai lingkungan dari ceramah atau pidato, tetapi dari apa yang mereka lihat setiap hari, bagaimana orangtuanya memperlakukan sampah, menghargai air, dan merawat tanaman di halaman rumah. Sebab cinta bumi tidak diwariskan lewat teori, melainkan lewat kebiasaan yang dicontohkan dengan kesungguhan. Dan mencintai bumi adalah bagian dari mencintai ciptaan-Nya.

Di Hari Lingkungan Hidup ini, saya tidak mengajak untuk menyelamatkan dunia sekaligus. Cukup mulai dari ruang yang paling kecil, diri sendiri dan rumah kita.

Sebab ini adalah bagian dari amanah sebagai khalifah di bumi. Dan rumah yang ramah lingkungan adalah benih bagi bumi yang kembali seimbang. Selamat Hari Lingkungan Hidup 2025

Hilirisasi dan Mata Air di Bumi Wawonii

Ditulis oleh: Firdaus Cahyadi

Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Indonesia ke-8 beberapa waktu yang lalu, Prabowo Subianto mengungkapkan akan melanjutkan hilirisasi nikel yang sudah dimulai pemerintahan sebelumnya. Beberapa pihak ungkapkan bahwa hilirisasi nikel ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Harapan terhadap peran nikel dalam capaian target pertumbuhan ekonomi karena semakin meningkatnya permintaan mineral kritis terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, permintaan nikel terus meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan mobil listrik. Pada 2020 kebutuhan nikel untuk baterai kendaraan listrik dan "power bank" atau Energy Storage System (ESS) mencapai 154 ribu ton. Kemudian, naik pada 2025 menjadi 372 ribu ton. Dan pada 2030 diperkirakan akan melonjak menjadi 795 ribu ton.

Hilirisasi nikel ini juga akan berpengaruh terhadap eksistensi pertambangan nikel di Indonesia. Salah satu pertambangan nikel itu ada di pulau kecil Wawonii, Sulawesi Tenggara. Cadangan nikel di dunia sebesar 139.409.000 ton. Dari jumlah cadangan nikel di dunia itu, sebesar 52% atau 72 juta ton Nikel ada di Indonesia. Angka-angka ini tentu menggiurkan para pebisnis tambang nikel. Sebaliknya, bagi masyarakat lokal, angka-angka itu tak lebih sebagai malapetaka bagi kehidupan mereka. Malapetaka tambang nikel itu misalnya dirasakan masyarakat di pulau kecil Wawonii.

Sebagian besar penduduk di pulau kecil itu berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hasil bumi mereka berupa cengkeh, pala, kelapa dan kacang mete. Dari hasil berkebun itu mereka bukan hanya bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari namun juga untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Bahkan sebagian anak-anak mereka telah berhasil meraih gelar diploma dan sarjana dari kampus-kampus di Propinsi Kendari hingga Jakarta.

Bukan hanya berkebun, mereka juga menjadi nelayan. Ikan segar bagi mereka bukan hanya dijual di pasar namun juga untuk lauk bergizi makan sehari-hari. Ikan-ikan, yang bila sudah sampai di restoran berharga mahal, begitu mudah didapatkan di Pulau Wawonii. Penduduk Wawonii pun hampir setiap hari menyantap ikan-ikan itu. Pendek kata, penduduk Wawonii sejahtera secara ekonomi.

Namun, setelah tambang nikel masuk di Wawonii, kesejahteraan mereka menurun. Penurunan kesejahteraan itu diakibatkan rusaknya alam yang berdampak pada hasil bumi mereka. Salah satu kerusakan alam itu adalah rusaknya mata air di Wawonii. Sebelum perusahaan tambang Nikel beroperasi di pulau kecil itu, penduduk bisa menikmati air bersih untuk kegiatan mereka sehari-hari, dari minum, mandi hingga mencuci. Setelah tambang nikel beroperasi di kawasan itu, mereka menjadi kesulitan menggunakan air bersih. Sebagian mereka mulai menggali sumur, menggunakan air hujan hingga harus berjalan jauh mencari air bersih untuk kehidupan sehari-hari.

Bukan hanya air bersih yang langka di Wawonii, udara bersih juga menjadi persoalan serius setelah perusahaan tambang nikel beroperasi di pulau kecil

itu. Debu-debu yang dihasilkan dari operasional tambang bukan hanya telah mencemari udara namun juga telah merusak tanaman-tanaman penduduk lokal.

Sebagian tanaman-tanaman di kebun penduduk rusak akibat debu-debu dari operasional tambang nikel. Kerusakan tanaman-tanaman ini berujung pada penurunan produksi dari kebun-kebun mereka. Akibatnya, pendapatan mereka menurun drastis bila dibandingkan sebelum tambang beroperasi di pulau tersebut.

Beberapa infrastruktur yang dibuat untuk memfasilitasi operasional tambang juga telah merusak wilayah pesisir. Ikan-ikan tertentu yang bernilai mahal sudah semakin sulit ditemukan. Bila ingin menangkap ikan-ikan tersebut, para nelayan harus melaut lebih jauh lagi. Artinya, biaya produksi mereka untuk sekali melaut akan meningkat.

Kesejahteraan ekonomi penduduk Wawonii menurun akibat kerusakan alam yang ditimbulkan oleh tambang nikel di pulau tersebut. Tambang nikel di pulau-pulau kecil seperti Wawonii bukan mensejahterakan penduduknya tapi justru menciptakan kemiskinan baru. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah yang mengizinkan masuknya tambang di Pulau Wawonii menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan struktural bagi penduduk setempat.

Bukan hanya kemiskinan, relasi sosial penduduk Wawonii yang tadinya harmonis pun menjadi terusik. Terjadi polarisasi antara pendukung dan penolak tambang Nikel. Penduduk yang mendukung tambang nikel tidak lagi saling membantu dan menyapa dengan penduduk yang menolak tambang. Modal sosial gotong-royong yang sebelumnya lekat dalam kehidupan penduduk Wawonii menjadi hancur.

Persoalan kehancuran alam, ekonomi dan juga relasi sosial ini nampaknya tidak dianggap sebagai sesuatu yang serius bagi pengambil kebijakan di tingkat lokal dan nasional. Para pengambil kebijakan menganggap bahwa Wawonii baik-baik saja setelah datangnya perusahaan tambang nikel. Padahal pada Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara tegas telah menolak permohonan perusahaan nikel yang beroperasi di Pulau Wawonii,

Sulawesi Tenggara untuk menghapus larangan menambang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) juga mengabulkan semua gugatan warga dan membatalkan sejumlah pasal dalam Perda Nomor 2/2021 tentang RTRW Konawe Kepulauan 2021-2041 terkait dengan pertambangan di Wawonii. Sementara itu, pada awal Oktober tahun ini, MA kembali mengabulkan upaya kasasi warga Wawonii dalam perkara gugatan pembatalan dan pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik sebuah perusahaan tambang nikel.

Dengan kemenangan beruntun penduduk Wawonii di ranah hukum itu seharusnya perusahaan tambang nikel segera menghentikan operasinya. Dengan demikian, mata air di Wawonii pun dapat segera dipulihkan. Namun, hingga artikel ini ditulis, kegiatan pertambangan nikel masih dilakukan di pulau itu. Pulau Wawonii beserta isinya telah menjadi korban dari ambisi transisi energi pemerintah yang salah arah. Entah sampai kapan air mata penduduk Wawonii akan terus mengalir di tengah mata airnya yang juga terus dihancurkan?

Indonesia di Persimpangan Ekologis: **Antara Eksploitasi dan Konservasi**

Ditulis oleh: Mutawaffika Arifah

Indonesia merupakan negara yang menyimpan kekayaan biodiversitas yang luar biasa. Berada di wilayah tropis dengan hutan hujan tropis yang luas, dan diapit oleh dua samudra serta dua benua, keanekaragaman hayati di Indonesia tidak hanya penting secara nasional, tetapi juga global. Namun, situasi lingkungan hidup saat ini menunjukkan bahwa keseimbangan ekologi yang selama ini menopang keberlangsungan ekosistem kini berada di ujung tanduk. Perubahan iklim global, aktivitas manusia yang tak terkendali, serta kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya ramah lingkungan menjadi ancaman serius bagi masa depan sumber daya alam Indonesia. Krisis lingkungan di Indonesia bukan hanya persoalan degradasi fisik dan pencemaran, melainkan juga mencerminkan tantangan struktural

dan kelembagaan yang kompleks.

Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia mengalami laju deforestasi yang sangat tinggi, menjadikan negara ini sebagai salah satu kontributor utama deforestasi dunia. Hutan primer dan sekunder yang merupakan habitat utama jutaan spesies kini mengalami tekanan berat akibat alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan, pembangunan infrastruktur, dan urbanisasi. Di sisi lain, kawasan pesisir dan laut yang menjadi sumber penghidupan bagi puluhan juta masyarakat juga menghadapi berbagai ancaman dari eksploitasi yang tidak berkelanjutan dan pencemaran. Semua faktor ini terjadi dalam konteks tata kelola sumber daya alam yang masih banyak menghadapi masalah seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Deforestasi dan Kerusakan Hutan: Krisis Berkepanjangan dengan Dampak Global

Deforestasi di Indonesia merupakan isu yang telah lama menjadi perhatian dunia karena skala dan dampaknya yang sangat besar. Indonesia diperkirakan kehilangan sekitar 500.000 hektare hutan setiap tahunnya pada dekade terakhir, meskipun angka ini menunjukkan tren penurunan jika dibandingkan dengan tahun 1990-an dan awal 2000-an yang mencapai 1-2 juta hektar per tahun. Namun, penurunan ini bukan berarti masalah telah terselesaikan, melainkan adanya perubahan modus deforestasi yang lebih sulit dipantau, seperti fragmentasi hutan dan degradasi hutan yang terjadi secara bertahap.

Hutan Indonesia yang luas terdiri dari berbagai tipe ekosistem, mulai dari hutan hujan dataran rendah yang kaya akan keanekaragaman, hutan pegunungan yang menjadi sumber air utama, hingga hutan rawa gambut yang memiliki peran penting dalam menyimpan karbon dalam jumlah besar. Kerusakan hutan gambut khususnya menjadi perhatian utama karena melepaskan emisi karbon dalam jumlah masif ketika dibuka atau terbakar. Kebakaran hutan dan lahan gambut yang rutin terjadi hampir setiap tahun menyebabkan polusi asap yang tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat Indonesia, tetapi juga negara-negara tetangga seperti Malaysia

dan Singapura. Kerusakan ini berdampak langsung pada perubahan iklim global, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat emisi gas rumah kaca terbesar akibat deforestasi.

Pendorong utama deforestasi adalah konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan kertas, pertambangan, serta infrastruktur. Kelapa sawit, sebagai komoditas ekspor terbesar Indonesia, sering kali mendapatkan prioritas dalam kebijakan nasional dengan alasan meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Namun, praktik perluasan perkebunan yang tidak terkendali dan kurangnya transparansi dalam penerbitan izin menyebabkan hilangnya tutupan hutan primer dan lahan gambut secara masif. Selain itu, pertambangan mineral dan batubara yang menyerap lahan dan sumber daya air juga meninggalkan dampak ekologis yang sulit dipulihkan.

Regulasi pemerintah untuk mengendalikan deforestasi, seperti moratorium izin baru di kawasan hutan primer dan gambut, serta program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) telah menunjukkan hasil yang bervariasi. Moratorium yang diluncurkan sejak 2011 sempat menurunkan laju deforestasi, tetapi sejak beberapa tahun terakhir efektivitasnya menurun karena sejumlah pengecualian dan revisi kebijakan. Program REDD+ juga menghadapi tantangan dalam implementasi di tingkat lokal, terutama terkait keterlibatan dan hak masyarakat adat sebagai penjaga hutan tradisional. Konflik agraria sering muncul ketika masyarakat lokal kehilangan akses terhadap wilayah kelola mereka akibat perluasan perkebunan dan konsesi industri, yang memperparah ketegangan sosial.

Solusi menyeluruh atas masalah deforestasi di Indonesia harus melibatkan reformasi tata kelola sumber daya alam secara fundamental. Pertama, perlu ditegaskan kembali pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lokal terhadap hutan yang mereka kelola secara tradisional. Studi akademik dan praktek di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat adat mampu mengelola hutan secara berkelanjutan dan efektif dalam menjaga keanekaragaman hayati. Legalitas wilayah adat harus diperkuat melalui peraturan daerah dan nasional. Kedua, pemerintah harus menerapkan prinsip zonasi hutan yang tegas, melindungi hutan primer dan lahan gambut

dengan kawasan konservasi permanen yang tidak dapat dialihfungsikan. Ketiga, penegakan hukum harus diperkuat, dengan memberikan sanksi tegas bagi pelaku deforestasi ilegal dan pembakaran hutan. Teknologi penginderaan jauh dan sistem pemantauan berbasis partisipatif dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Keempat, pengembangan ekonomi berbasis konservasi dan insentif untuk praktik agroforestri dan hutan lestari harus dikembangkan untuk menyediakan alternatif penghidupan bagi masyarakat sekitar hutan.

Ekosistem Laut dan Pesisir: Tantangan Kompleks di Wilayah Maritim Terbesar Dunia

Indonesia memiliki wilayah laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luas, menjadikannya negara kepulauan terbesar di dunia. Kekayaan ekosistem laut, mulai dari terumbu karang, padang lamun, hingga hutan mangrove, merupakan habitat bagi ribuan spesies laut dan sumber penghidupan penting bagi jutaan masyarakat pesisir. Sayangnya, ekosistem laut dan pesisir ini menghadapi tekanan berat dari berbagai aktivitas manusia yang tidak terkendali.

Kerusakan ekosistem mangrove menjadi salah satu persoalan utama. Mangrove tidak hanya berfungsi sebagai penyangga alami terhadap abrasi dan badai, tetapi juga sebagai penyimpan karbon yang efektif. Namun, laju degradasi mangrove di Indonesia mencapai 3-5% per tahun akibat konversi menjadi tambak udang, kawasan industri, dan pemukiman. Hal ini menyebabkan hilangnya fungsi ekologis dan ekonomi dari mangrove, serta meningkatkan kerentanan pesisir terhadap bencana alam.

Terumbu karang Indonesia, yang menjadi bagian dari Segitiga Karang Dunia (Coral Triangle), memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati laut dan mendukung industri perikanan. Sayangnya, terumbu karang mengalami kerusakan yang signifikan akibat praktik penangkapan ikan yang merusak (seperti bom ikan dan sianida), pencemaran, serta pemutihan karang yang diperburuk oleh perubahan iklim dan peningkatan suhu laut. Menurut laporan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sekitar 70% terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan dalam berbagai tingkat keparahan, mengancam keberlanjutan ekosistem dan ketahanan

pangan masyarakat pesisir.

Selain itu, pencemaran laut yang berasal dari limbah industri, pertanian, dan domestik juga berdampak pada kesehatan ekosistem pesisir. Limbah plastik, terutama mikroplastik, telah terdeteksi dalam jaringan biota laut dan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia yang mengkonsumsi produk laut. Peningkatan sedimentasi akibat deforestasi di hulu juga mengganggu proses fotosintesis lamun dan karang, mempercepat kematian ekosistem tersebut.

Perikanan di Indonesia menghadapi tantangan overfishing dan praktik penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Meskipun pemerintah telah berupaya mengatur kuota tangkap dan melarang alat tangkap destruktif, implementasi di lapangan masih terkendala karena keterbatasan pengawasan dan konflik kepentingan. Nelayan tradisional yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan sering kali tersisih oleh industri perikanan besar dan regulasi yang tidak memihak mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, pengelolaan wilayah pesisir dan laut harus dilakukan secara terpadu dan berbasis ekosistem. Penerapan marine spatial planning (MSP) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat membantu menyeimbangkan antara konservasi, ekonomi, dan sosial. Penguatan kawasan konservasi berbasis komunitas sangat penting untuk memberikan ruang bagi masyarakat lokal mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Kebijakan pengurangan limbah plastik dan peningkatan sistem pengelolaan limbah domestik dan industri juga harus menjadi prioritas nasional, termasuk investasi dalam teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Di sektor perikanan, pemberdayaan nelayan kecil melalui akses modal, teknologi ramah lingkungan, dan pelatihan penangkapan berkelanjutan perlu diintensifkan untuk menjaga keseimbangan ekologi sekaligus keberlanjutan ekonomi.

Mandiodo Nasibmu Kini: Lingkungan dalam Dimensi Kehidupan Manusia

Ditulis oleh: Iskandar Wijaya

Lingkungan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang mencakup segala yang berada di sekitar individu maupun kelompok sosial, lingkungan dalam kehidupan manusia dikategorikan menjadi tiga komponen yaitu lingkungan abiotik terdiri dari elemen non-hayati udara, air, tanah, cahaya matahari dan unsur kimia lainnya yang mendukung kehidupan, biotik yaitu semua makhluk hidup termasuk manusia, hewan, tumbuhan dan mikroorganisme dan sosial budaya yaitu aspek non fisik dari manusia seperti norma, nilai, kebiasaan dan institusi sosial, ketiga unsur tersebut saling berinteraksi dalam membentuk kehidupan masyarakat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya¹

Saat ini pemerintah seolah melihat lingkungan terutama Hutan dan manusia itu bukan suatu hal yang saling berhubungan, padangan ini hanya menjadikan alam sebagai objek eksploitasi dan menjadikan manusia alat kerja semata dengan dalih membuka lapangan kerja, energi terbarukan, masa depan manusia, dan ternyata kita dimanipulasi dengan gaji yang tinggi namun tidak berkelanjutan.

Kebijakan mengenai Izin usaha pertambangan (IUP) terhadap perusahaan tambang Oleh pemerintah pusat seolah memudahkan di Pulau Sulawesi dan Maluku tanpa mempertimbangkan keberlanjutan, misalnya desa Mowundo, Mandiodo, Tapuemea, dan Tapunggya kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, masyarakat yang menggantungkan pada masyarakat hidupnya pada alam yaitu pada hasil perkebunan dan hasil tangkapan laut selama bertahun-tahun bahkan generasi.

Tetapi, hubungan alam dan dimensi kehidupan masyarakat berubah, sejak masuknya izin konsesi pertambangan di desa Mowundo, Mandiodo, Tapuemea, dan Tapunggya pada tahun

2005 dan beroperasi pada tahun 2009, perlahan tapi pasti alih fungsi lahan secara besar-besaran terjadi, perubahan mata pencaharian menjadi buruh

¹ Ambo Upe. 2025. Sosiologi Lingkungan Tafsir teroris dan isu-isu Kontemporer

di perusahaan pertambangan serta menggantungkan ekonominya pada sektor pertambangan.

Aktivitas tambang di desa Mowundo, Mandiodo, Tapuemea, dan Tapunggya melahirkan istilah baru untuk mendeskripsikan aktivitas tambang yang berada di 4 (empat) desa tersebut yaitu Blok Mandiodo, adanya aktivitas tambang tersebut mengakibatkan Kerusakan lingkungan, deforestasi secara besar-besaran, rusaknya ekosistem hutan, banjir menjadi langganan setiap musim hujan, infrastruktur jalan tidak layak untuk dilewati, potensi terkena penyakit Ispa meningkat akibat dari debu, pesisir laut ikut tercemar, nelayan semakin jauh mencari ikan dengan hasil yang tidak menentu dan biaya operasional yang cukup mahal.

Petani yang sedang memikul pacul dan memegang arit hampir tidak ditemukan di desa Mowundo, Mandiodo, Tapuemea, dan Tapunggya hanya ada beberapa tanaman yang terlihat seperti pisang dan singkong dalam skala perkebunan rumahan sementara itu perkebunan dengan luas setengah hektar tidak lagi ditemukan.

Sumber daya alam sebagai Kutukan

Menurut La Husen Zuada, Eka Suaib (2021) dalam buku paradoks kelimpahan sumber daya alam Kekayaan sumber daya alam menghadirkan dua pandangan yang kontradiksi. Pertama, sumber daya alam sebagai berkah. Pandangan ini beranggapan bahwa keberlimpahan sumber daya alam berdampak positif bagi kehidupan politik dan ekonomi suatu negara daerah. Asumsinya, hasil dari penjualan dan pajak ekstraksi sumber daya alam, akan meningkatkan

pendapatan daerah dan mewujudkan kesejahteraan. Masyarakat yang sejahtera pada gilirannya akan mendorong kehidupan politik ke arah yang lebih demokratis. Kedua, sumber daya alam sebagai kutukan. Kelompok ini melihat bahwa kelimpahan sumber daya alam menghadirkan kerusakan lingkungan (bencana), kekacauan politik, otoritarianisme, perang, konflik sosial, korupsi dan kemiskinan.²

Apa yang diungkapkan dalam buku tersebut, kini terjadi di blok mandiodo, Blok mandiodo adalah potret nyata dari kegagalan tata kelola pertambangan

²La Husen Zuada, Eka Suaib, Laode Harjudin, Harnina Ridwan, Nur Azizyah Mukmin, Ali Imron, Achmad Abidin, Ambo Upe, M. Nur Alamsyah, 2021. Paradoks Kelimpahan Sumber Daya Alam.

yang abai terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan hak masyarakat atas ruang hidup. Meski wilayah ini menjadi magnet bagi puluhan perusahaan tambang nikel yang berlomba-lomba mengeksploitasi sumber daya alamnya, dampak positif yang dijanjikan seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan infrastruktur, dan pembukaan lapangan kerja justru nyaris tidak terasa.

Kini, Perusahaan yang tidak lagi beroperasi, lapangan kerja berkurang drastis, banyak rumah makan tidak lagi mempunyai pelanggan, usaha laundry tutup, kepala-kepala keluarga kehilangan mata pencaharian, tidak ada lahan pertanian dan laut tercemar.

lebih lanjut Menurut Horkheimer dan Adorno (1944) bahwa perkembangan rasionalitas instrumental dalam modernitas menciptakan cara berpikir yang melihat alam sebagai objek yang dapat dieksploitasi tanpa batas, yang pada akhirnya mengarah pada krisis ekologi yang kita hadapi saat ini. dalam pemikiran Horkheimer dan Adorno rasionalitas instrumental merupakan cara berpikir yang hanya berorientasi pada efisiensi dan kontrol, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai atau ekologis.³

Sehubungan pandangan di atas, masyarakat di Mandiodo menghadapi tantangan yang kian kompleks. Jalan-jalan desa rusak parah akibat lalu lintas kendaraan tambang berat yang terus-menerus beroperasi tanpa regulasi ketat. Lubang-lubang bor ditinggalkan terbuka tanpa rencana reklamasi yang jelas.

Aktivitas pertambangan berlangsung secara intensif bahkan di berdekatan dengan kawasan permukiman, hutan sekunder, lahan pertanian produktif, tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sulit diakses oleh publik, Pemisahan antara manusia dan alam ini menurut mereka adalah akar dari krisis lingkungan yang terjadi saat ini (Horkheimer, 1974).

Lebih lanjut, Menurut Herbert Marcuse (1964) mengembangkan teori sosial kritis, khususnya dalam kaitannya dengan kapitalisme, teknologi dan ekologi. ia berpendapat bahwa sistem kapitalisme modern telah

³M. Nur Alamsyah, 2021. Paradoks Kelimpahan Sumber Daya Alam.

menciptakan eksploitasi ganda, yaitu terhadap manusia dan alam bahwa dengan melimpahnya sumber daya alam dalam hal ini Nickel, berkaitan dengan hal tersebut di blok mandiodo menjadi sasaran empuk Investasi industri pertambangan yang

berakibat pada hilangnya ratusan Hektar hutan, Biodiversitas, resapan air, daya dukung yang mengkhawatirkan, konflik sosial dan hilangnya kebudayaan Masyarakat lokal

langkah menangani Krisis ekologis di blok mandiodo

Kini Blok Mandiodo berhadapan dengan Deforestasi yang cukup besar di daerahnya sendiri serta dampak yang akan terjadi, banjir dan longsor mengancam setiap musim penghujan, debu akan meningkatkan penyakit ispa dan rusaknya infrastruktur jalan akan menghambat mobilitas masyarakat, tanah tidak lagi subur laut tercemar, masyarakat kehilangan mata pencaharian Blok mandiodo menjadi kutukan atas kelimpahan sumber daya alam yang miliknya.

maka dari solusi dari Krisis ekologis di blok mandiodo menurut Haraway (2016) dalam memahami masalah ekologis perlu pendekatan Multidisipliner bahwa tidak cukup hanya melihat isu lingkungan dari sudut pandang sains alam atau kebijakan publik, perlunya mempertimbangkan aspek budaya, sejarah dan filosofis yang membentuk cara manusia berinteraksi dengan lingkungan mereka.

Haraway mengusulkan bahwa solusi terhadap krisis ekologis harus melibatkan perubahan dalam cara berpikir dan bertindak, bukan hanya pada level individu tetapi juga pada level institusi sosial dan kebijakan global.

Selamat Hari Lingkungan hidup, tidak ada masa depan yang lebih baik selain hidup berdampingan dengan alam.

Membaca Ulang Paradoks Perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Ditulis oleh: Silvani Andalita S.H., M. Ling

Tanggal 5 Juni, dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia / HLH (World Environment Day) secara umum. Disebutkan secara umum karena persoalan lingkungan ini masih dipecah beberapa sektor, contohnya masih ada Hari Margasatwa Sedunia tanggal 3 Maret, Hari Daur Ulang Global yang dirayakan setiap 18 Maret juga, dan masih banyak lagi sektor-sektor lingkungan yang diperingati dan diharapkan bisa menjadi pengingat benar akan kepedulian kita sebagai makhluk paling rasional untuk menyikapi alam ini.

HLH yang akan datang tanggal 5 Juni nanti, pertama kali ditetapkan oleh PBB pada tahun 1972, momentum ini dimaksudkan sebagai pengingat global akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, HLH diperingati dengan berbagai kegiatan seperti penanaman pohon, kampanye bersih-bersih, seminar, hingga aksi lingkungan massal.

Salah satu ironi yang kerap ditemui dalam peringatan HLH adalah timbulnya sampah baru dari kegiatan yang seharusnya ramah lingkungan. Spanduk plastik sekali pakai sebagai simbol terselenggaranya acara dengan megah masih dipasang sebagai simbol memperingati HLH, konsumsi air minum kemasan, sampah makanan, hingga souvenir tak terpakai justru menjadi "jejak karbon" dari sebuah kegiatan memperingati kepedulian lingkungan hidup. Sungguh aneh tapi nyata, ada salah satu perayaan HLH yang diadakan pemerintah setempat yang penulis hadiri dan dibagikan souvenir tote bag untuk mengurangi sampah sekali pakai. Namun tote bag itu terbungkus plastik dengan cantiknya.

Relevansi HLH nampaknya perlu dibaca ulang dengan melihat fakta dan urgensi isu-isu lingkungan saat ini. Perubahan iklim, deforestasi, krisis air bersih, polusi udara, dan kerusakan ekosistem menjadi masalah global yang nyata dan mendesak. HLH berfungsi sebagai momen untuk meningkatkan kesadaran publik, sekaligus menimbulkan perhatian ekstra soal pengambilan kebijakan, serta mengajak sektor swasta dan masyarakat sipil

terutama rumah tangga untuk terus berpartisipasi dalam perbaikan lingkungan. Tidak relevan juga kiranya kita bicara pelestarian saat ini, melainkan perbaikan lingkungan dirasa lebih tepat dengan mengingat kondisi lingkungan yang sudah rusak ini.

Gerakan memperingati HLH ini bisa terkikis bila pelaksanaannya hanya bersifat simbolis atau seremonial belaka. Saat HLH berubah menjadi ajang formalitas dengan acara besar-besaran namun minim dampak jangka panjang, nilai edukatif dan transformasinya bisa jadi sekadar basa-basi.

Kegiatan HLH menuai Problem Sampah?

Kegiatan HLH seringkali dimaksudkan sebagai aksi nyata: pembersihan pantai, penanaman pohon, peluncuran gerakan hijau, dan sebagainya. Sayangnya, belum semua pelaksanaan kegiatan ini mempertimbangkan prinsip zero waste atau reduce-reuse-recycle (3R) secara utuh. Misalnya konsumsi air mineral dalam kemasan sekali pakai disediakan untuk peserta, lalu berserakan di lokasi; penggunaan spanduk besar dan dekorasi dari bahan plastik hanya digunakan sekali pakai; dan yang sudah disinggung di atas tadi soal pemberian souvenir atau merchandise tidak berbahan ramah lingkungan. Selain itu yang sangat penting adalah belum adanya pemilahan sampah di setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Problem ini akhirnya menunjukkan adanya diskoneksi antara niat dan implementasi. Bahkan dalam peringatan yang semestinya menjadi teladan, aspek keberlanjutan belum dijadikan prinsip utama. Oleh karena itu, agar HLH tetap relevan dan bermakna, diperlukan perubahan pendekatan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain menyadari penggunaan desain kegiatan berbasis keberlanjutan; tentu saja menggunakan bahan ramah lingkungan, atau bisa memanfaatkan barang bekas, lalu juga kurangi konsumsi barang sekali pakai, dan rancang acara yang minim sampah. Acara yang minim sampah tentu harus didukung dengan fasilitas yang juga mendukung berjalannya tema.

Untuk mengetahui indeks perubahan tentu harus didukung dengan penilaian atas jumlah sampah yang dihasilkan suatu kegiatan, sumber daya yang digunakan, hingga dampak lingkungan dari kegiatan tersebut. Jika ada

parameter yang jelas dan angka penurunan yang stabil dari setiap kegiatan per tahunnya maka barulah bisa disebut merayakan HLH yang tepat dan relevan. Kegiatan memperingati HLH seharusnya tidak hanya menjadi seremoni yang justru menghasilkan limbah atau sampah baru, tetapi menjadi refleksi dan langkah konkret menuju gaya hidup berkelanjutan. Jika tidak, kita hanya akan terus memperingati hari lingkungan sambil terus mencemarnya— sebuah ironi yang tidak layak untuk diteruskan.

Kesenjangan Sosial Antara Oligarki dan Petani dalam Lingkungan Hidup

Ditulis oleh: Riskan S.P

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jika menilik di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kesenjangan sosial adalah ketidak seimbangan, perbedaan, dan juga jurang pemisah yang hadir dalam tatanan masyarakat. Kesenjangan sosial hadir karena adanya distribusi keadilan yang tidak merata bahkan jarak ketimpangannya sangat jauh serta memengaruhi sektor – sektor fundamental lainnya seperti pertanian, ekonomi, sosial, pendidikan bahkan politik sehingga terkadang menyebabkan patologi sosial yang berkepanjangan dan sistemik.

Tentu jika hal ini dibiarkan atau tidak diminimalisir kesenjangan sosial cepat atau lambat menjadi budaya dan dinormalisasikan dalam lingkungan hidup. Sedangkan menurut pakar oligarki saat ini yaitu (Jeffry A. Winters : 2011 : Oligarki) ia berpendapat oligarki adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya manusia yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya.

Kontrol sosial yang dilakukan oligarki sangat merugikan masyarakat banyak namun yang menikmati keuntungan hanya segelintir orang, bahkan kerugian negara dapat diwariskan tahunan bahkan puluhan tahun lamanya, ia masuk dalam beberapa lini sektor profesi di Indonesia, baik swasta maupun negeri entah itu eksekutif, legislatif dan yudikatif, oligarki menyuntikan pengaruhnya layaknya virus sehingga apapun dan

siapa pun yang terkena dampaknya akan lumpuh seketika sehingga kemungkinan besar tidak ada yang berani berhadapan langsung dengannya.

Selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, petani ialah orang yang mata pencahariannya dalam bentuk bercocok tanam. Secara garis besar peran petani dalam keberlangsungan peradaban sangat krusial untuk lingkungan hidup, akan tetapi kaum yang sangat rentan termarginalkan oleh penguasa.

BAB II PEMBAHASAN

A. Fenomena sosial oligarki dan petani dalam lingkungan hidup

Tidak bisa dipungkiri gesekan – gesekan antara oligarki dan petani selalu seksi untuk ditonton, adegan – adegan perseteruan kedua kubu selalu berseliweran di media sosial bagaikan partai final pertandingan yang mengisahkan perjuangan kedua kubu yang secara kekuatan dan kekuasaan tidak seimbang tentu yang paling digdaya ialah oligarki dan yang selalu dieksploitasi ialah para petani atas nama eksplorasi.

Kisah – kisah kekejaman oligarki akan abadi tercatat dalam lembaran – lembaran sejarah Indonesia yang kelam dimana perselingkuhan antara oligarki beserta koleganya sudah dilakukan secara terang – terangan melibatkan banyak pihak demi cuan, tuan dan puan, ujung – ujungnya petani yang menjadi tumbal pesta oligarki, petani yang sejatinya menjadi ujung tombak negara kini berada diujung tanduk ia tidak bisa berbuat apa – apa ketika oligarki sedang bertindak dengan lihai memainkan peranannya masing – masing baik itu swasta, negeri bahkan pemerintah itu sendiri.

Oligarki dipuji oleh pengikutnya bagaikan pahlawan padahal harus dilawan, oligarki telah membuat lingkungan hidup menjadi mati baik itu kematian lahir dan batin, mari kita lihat fenomena oligarki dan petani dalam lingkungan hidup. Pertama proyek food estate di Kalimantan tengah, dikutip dari (Emedia.dpr.go.id) (Maret: 2024), komisi IV DPR RI Johan Rosihan merespon pernyataan pemerintah yang mengumumkan bahwa panen jagung food estate di gunung mas Kalimantan Tengah

menghasilkan sekitar 25 ton, hal ini sebagai bukti nyata bahwa food estate sebagai proyek gagal dan hanya membuang – buang anggaran, karena telah menghabiskan anggaran Rp 54 miliar untuk proses penanamannya dan membuka lahannya anggaran Rp 1,5 Triliun.

Ini merupakan sebuah fakta menyakitkan yang harus ditelan bersama bahwa dibalik tujuan baik jika disusupi oleh kepentingan oligarki maka akan gagal, yang mendapat untung oligarki yang mendapat buntung para petani, belum lagi fakta kerusakan lingkungan hidup perlahan mati, flora dan fauna tergusur, deforestasi meluas, pohon, hutan, yang sudah berusia puluhan tahun bahkan ratusan tahun disulap menjadi lahan pertanian yang tidak menguntungkan petani yang ada hanya membuat lingkungan hidup menjadi mati, inilah permufakatan jahat terselubung yang sebenarnya dari oligarki ia telah bercokol dalam beberapa profesi bahkan para petinggi – petinggi negara yang memberikan akses legitimasi dalam mengeksploitasi atas nama eksplorasi kesejahteraan masyarakat.

Kedua adalah pertambangan, dalam beberapa tahun ini pemerintah memasifkan bidang pertambangan dengan dalih menciptakan lapangan pekerjaan serta menambah pendapatan daerah dan pendapatan negara, ini sepenuhnya tidak salah jika dilakukan dengan bijaksana karena ada banyak penghuni dalam lingkungan hidup seperti alam, manusia, lahan petani, flora dan fauna bahkan memengaruhi perspektif masyarakat, pertambangan sangat menarik menyilaukan mata para oligarki untuk menancapkan pengaruhnya.

Pertambangan sedang naik daun bagaikan piala bergilir yang diperebutkan satu sama lain berbagai macam jurus pun dikeluarkan demi mendapatkan sebuah legitimasi dari pemerintah setempat alhasil perselingkuhan antara institusi pun dilakukan secara sistemik demi keuntungan kelompok menghisap sumber daya alam sedikit demi sedikit hingga gunung menghilang, masyarakat adat digusur, petani termarginalkan, tanah satu – satunya diambil paksa atau dihargai sangat murah.

Cuan pun mengalir dikantong para oligarki sedangkan air mata mengalir di mata petani, lingkungan hidup yang dulu asri harmonis perlahan

dikeruk habis bahkan tak jarang menyisakan residu pada tanah petani, pulau Sulawesi sendiri merupakan salah satu surga untuk pertambangan hal ini yang membuat mata oligarki terbelalak melihat kekayaan alam Indonesia yang melimpah yang membuat tangan oligarki gatal untuk mengeksploitasi atas nama investasi, beberapa tambang yang terdapat di Sulawesi seperti tambang nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, Morowali, dan tambang emas di Luwu, Sulawesi Selatan.

Para oligarki leluasa menari – nari dalam menjalankan aksinya karena ia telah ditopang oleh penguasa baik dari eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagaimana program pemerintah yaitu hilirisasi nikel, maka tak heran kaum tani terpaksa beralih profesi bahkan kehilangan tanahnya, mata pencaharian satu – satunya sebagian besar institusi tidak ada yang bisa diandalkan untuk membantu bahkan kepada yang mengaku penegak hukum malah ikut melacurkan diri dalam gerombolan oligarki, maka tak heran profesi petani termasuk dalam penyumbang rakyat miskin di Indonesia karena selain sumber daya alam yang dieksploitasi sumber daya manusia pun ikut dieksploitasi.

Institusi yang seharusnya melindungi petani tak bisa diharapkan uluran tangannya, ia hanya butuh uluran tangan petani ketika pemilu datang, karena ia telah tergabung dalam gerombolan oligarki inilah yang patut dikatakan sebagai penghianat bangsa yang sesungguhnya. Dominasi oligarki dalam lingkungan hidup sangat kuat, karena selalu dikawal penguasa bahkan kaum agamawan bertekuk lutut dalam cengkaman oligarki dalam mengeruk isi perut bumi demi isi perut oligarki dan yang menderita isi perut petani.

Tanah – tanah masyarakat adat, petani itu dikeruk diambil keuntungannya dengan rakus yang disisakan hanyalah kerusakan lingkungan hidup bahkan residu untuk anak cucu kita. Senada dengan itu dalam jurnal (Muhammad Sibgatullah agussalim, Ariana, Ramlah Saleh : 2023) (Kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel di kabupaten Kolaka melalui pendekatan politik lingkungan), memaparkan kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel memberikan dampak bagi kerusakan lingkungan seperti kerusakan jalan, pencemaran air sungai DAS, polusi udara, kerusakan lahan, kerusakan flora dan fauna dan tidak

ada pemberdayaan kesejahteraan masyarakat dan salah satu penyebab kerusakan lingkungan ialah aspek sosial, ekonomi dan politik.

B. Kesenjangan sosial lingkungan hidup antara oligarki dan petani

Memasuki fase pemerintahan presiden prabowo seakan berpihak pada petani dibuktikan dengan kebijakan pemerintah yaitu swasembada pangan, bahkan para koleganya ikut dilibatkan seperti TNI dan polisi untuk mewujudkan ketahanan pangan, lantas dimana peran petani saat ini ? Sungguh ironi bukan ! petani yang seharusnya berada pada garda terdepan hanya dijadikan sebagai pemain cadangan atau dijadikan tameng saja, jika ada kegagalan yang disalahkan petani, jika ada keberhasilan yang diberi tepuk tangan ialah oligarki.

Mari kita lihat beberapa kesenjangan sosial antara oligarki dan petani, lahan petani di Indonesia berada dalam zona petani gurem yaitu luas 0,5 hektar, sedangkan lahan oligarki bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan hektare untuk dieksploitasi dengan mudah, inilah kesenjangan sosial yang tidak masuk akal sangat disparitas bagaikan langit dan bumi. Di Tengah gencarnya presiden kita menggoda petani untuk berproduksi semaksimal mungkin menuju swasembada pangan akan tetapi bagaimana mungkin mewujudkannya jika lahan hanya seluas 0,5 hektar per petani sungguh sangat miris bukan.

Ditambah lagi dengan kepemilikan lahan petani yang tidak jelas tidak adanya bukti otentik sebagai legitimasi kepemilikan lahan, yang mengakibatkan oligarki leluasa dengan mudah mencaplok tanah para petani, pemerintah menuntut petani untuk swasembada pangan namun petani tidak dituntun dengan memenuhi hak – hak mereka, oligarki diberikan panggung, petani termarginalkan padahal ia yang memberi makan dan kehidupan, akses lahan petani dibatasi akses lahan oligarki tak terbatas, maka tak heran oligarki kaya semakin kaya petani miskin semakin miskin.

Inilah kesenjangan lahan lingkungan hidup yang disparitas dimana lingkungan hidup sejatinya harus dimanfaatkan serta dilestarikan bersama – sama bukan hanya dimanfaatkan oleh para oligarki inilah

penjajah yang sebenar – benarnya dan sesungguhnya – sungguhnya, menjajah bukan hanya dari ekologi, sosiologi, bahkan psikologi, Sejatinya lingkungan hidup harus dipandang sebagai entitas yang benar – benar hidup dan menghidupi bumi, bukan hanya sekedar dieksploitasi lalu dicampakkan lingkungan hidup yang dimatikan baik itu pohon, hewan, dan air demi cuan, puan dan tuan oligarki.

Oligarki memiliki pemain yang paripurna dari berbagai sektor, terutama dalam sektor politik, pembuat kebijakan, kesenjangan sosial dalam bidang politik, antara pembuat kebijakan, karena undang – undang pesanan oligarki hanya hitungan hari langsung jadi disahkan dikebut sekencang – kancangnya walaupun disahkan secara tersembunyi, sedangkan undang – undang untuk petani misalnya reforma agraria puluhan tahun masih abstrak tidak ada kejelasan hingga saat ini. Senada dengan itu (Koalisi masyarakat sipil catat 94,8 persen lahan dikuasai korporasi) (2022), dari 53 juta hektare penguasaan lahan yang diberikan pemerintah, hanya 2,7 juta hektar yang diperuntukan bagi rakyat, sisanya 94,8 persen untuk korporasi.

Tangan Manusia dan Wajah Kelam Terumbu Karang di Pantai Carita

Ditulis oleh: Ahmad Zaki Mubarak

Indonesia dengan segala kekayaan alamnya, ikan-ikan yang bersembunyi dibalik koral-koral yang berwarna-warni, pasir putih dan udara segar yang menghembus kencang, bulir-bulir sargassum yang mengapung di atas Pantai yang biru gemilang.

Mungkin beberapa tahun mendatang, keindahan itu hanya menyisakan cerita, dan akan digantikan oleh limbah industri yang rakus, sampah-sampah domestik yang mengalir dari hulu hingga hilir, mengapung dan berakhir tragis di lautan.

Pantai carita, sebuah percikan surga dari barat pulau jawa, sebelum pabrik pabrik di sekitar Anyer dan Cilegon berdatangan, ia adalah rumah bagi biotik laut, karang-karang menghiasi lautan dalam, ikan ikan berlindung

menjadikan terumbu karang sebagai selimut, aktivitas menyelam menjadi kegiatan yang mengasyikan, sialnya kini pabrik pabrik, perusahaan perusahaan atau mereka yang berkepentingan dalam kebijakan tak pernah tahu bagaimana kini lautan menangis.

Bulan lalu saya mengunjungi Balai Konservasi Bawah Laut Sukarame di Pantai Carita, di tempat inilah saya bertemu para pemuda yang merasa hatinya terpuak atas kondisi alam yang lambat laun kian memburuk, saya diajari bagaimana transplantasi terumbu karang sangat penting bukan hanya sebagai rumah biota laut, di samping itu karang adalah pencegah abrasi arus laut, karang juga ekowisata yang meningkatkan laju ekonomi.

Saya bertanya kepada salah satu anggota dari komunitas

“Bagaimana bapak melihat kondisi pantai ini, jika dibandingkan kondisi pantai saat bapak masih kecil?”, saya lihat beliau nampak murung, mungkin saja tercengang mendengarkan pertanyaan saya

lantas beliau menjawab *“dimasa saya kecil, Pantai Carita ini indah sekali”* sembari menunjukkan jari manisnya ke arah bibir pantai yang sedang mengalami pasang,

lalu melanjutkan pembicaraannya *“di daerah dekat situ saja, karang sudah dapat terlihat jelas, ikan ikan seperti yang ada di kartun nemo mudah sekali saya cari, namun semua berakhir ketika nelayan-nelayan menggunakan obat untuk menangkap ikan, ditambah lagi limbah pabrik dan sampah domestik yang kini merajalela sepanjang pantai”*, kalimat demi kalimat beliau lontarkan, saya hanya terdiam dan menunduk sembari memandang bibir pantai.

Di dalam benak saya, Mungkin saja kini alam telah membenci manusia

Bagaimana tidak? alam telah menyediakan keindahan, alam telah menyediakan ikan ikan yang kita konsumsi setiap harinya, alam yang telah menjaga keseimbangan daratan dan lautan, alam yang telah membalas oksigen dari kiriman emisi karbon yang kita hembuskan setiap waktu, tapi manusia dengan angkuhnya membalasnya dengan luka, seolah olah ia tak mengenali bagian dari hidupnya, manusia benar-benar telah melukai alam,

limbah industri dan pabrik-pabrik tak terkontrol membuang limbah ke lautan, pengusaha-pengusaha menggantikan hutan-hutan lalu menumbuhkan vila-vila di pegunungan, nelayan yang frustrasi akan hasil laut kini beralih dengan pukut harimau atau lebih dari itu dengan bahan-bahan peledak, agar pendapatannya kian meningkat.

Memang benar makhluk yang paling rakus dan angkuh adalah manusia, ia hanya bertopeng akal, namun berjiwa predator, hanya memikirkan kelayakan hidup di dunia tanpa memikirkan alam sekitar, mungkin aku pun bagian dari makhluk yang rakus dan angkuh itu, namun kini aku mulai berpikir dan merenung, bagaimana agar alam memaafkan kesalahan manusia, nampaknya sulit sekali, namun saya berjanji akan selalu merangkulmu alam, meski engkau membenciku.

Tulisan ini saya persembahkan kepada alam, yang telah memberikan hidupnya untuk manusia, alam yang terus sabar meski kini kian terancam.

Indonesia dan Jeritan Sunyi Alam: Antara Janji CSR, Akuntansi Lingkungan, dan Realita yang Terluka

Ditulis oleh: Muh. Fachrul

Indonesia adalah negeri yang diberkahi. Tanahnya subur, hutannya menjulang, lautnya menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Sebagai negara megabiodiversitas terbesar kedua di dunia, Indonesia semestinya menjadi pemimpin dalam perlindungan lingkungan. Namun sayangnya, di tengah anugerah itu, alam kita terus menjerit dalam diam. Tanpa kita sadari, pembangunan yang kita agungkan justru mengikis bumi yang menopang kehidupan.

Setiap tahun, Hari Lingkungan Hidup Sedunia hadir bak pengingat kolektif. Namun dibalik seminar dan kampanye bertema “selamatkan bumi”, ironi besar terus terjadi: hutan adat ditebang demi tambang legal, pesisir hilang ditelan abrasi karena mangrove telah digantikan villa, dan udara kota-kota besar penuh racun dari kendaraan dan pabrik. Lalu siapa yang bertanggung jawab?

Jawaban populer yang sering terdengar adalah “perusahaan.” Maka muncul istilah Corporate Social Responsibility (CSR) tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. CSR adalah janji mulia bahwa keuntungan tidak boleh diraih dengan merusak, bahwa perusahaan bukan hanya entitas bisnis, tetapi juga aktor sosial dan ekologis. Namun, apakah CSR di Indonesia sungguh-sungguh menjadi alat perbaikan, atau sekadar alat pencitraan?

Banyak perusahaan mengklaim telah menjalankan CSR dengan baik. Mereka membangun taman kota, menanam pohon seremonial, atau membagikan paket sembako. Tetapi apakah itu cukup? Seringkali kegiatan CSR hanya bersifat kosmetik proyek sekali jadi yang tidak menyentuh akar persoalan. Padahal, jika benar-benar dilakukan dengan niat tulus dan sistematis, CSR bisa menjadi alat koreksi dan pemulihan atas jejak ekologis yang ditinggalkan kegiatan bisnis. Seharusnya, CSR bukan hanya tentang memberikan kembali sebagian kecil, tapi mengubah cara beroperasi agar tidak terus-menerus merusak.

Dalam konteks inilah, **akuntansi lingkungan** seharusnya hadir sebagai alat kontrol yang transparan. Akuntansi lingkungan bukan sekadar menghitung biaya produksi, tapi juga menghitung biaya sosial dan ekologis dari setiap aktivitas perusahaan. Berapa emisi yang dihasilkan? Berapa hektar hutan yang rusak? Berapa kerugian ekologis yang diderita masyarakat sekitar? Dan yang terpenting: bagaimana semua itu dilaporkan secara jujur dalam laporan keuangan perusahaan?

Sayangnya, praktik akuntansi lingkungan di Indonesia masih jauh dari ideal. Banyak perusahaan besar enggan membuka data lingkungan mereka. Laporan keberlanjutan yang dibuat kadang hanya penuh jargon dan simbol, bukan data konkret dan analisis dampak. Sementara masyarakat, akademisi, dan media sering kesulitan mengakses informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja lingkungan perusahaan. Tanpa transparansi dan pengawasan, CSR dan akuntansi lingkungan hanya akan menjadi formalitas, bukan alat perubahan.

Kita tidak bisa menutup mata bahwa Indonesia sedang mengalami krisis lingkungan serius: deforestasi besar-besaran, pencemaran sungai, bencana ekologis karena perubahan iklim, dan degradasi lahan gambut yang parah.

Krisis ini tidak terjadi begitu saja. Ia adalah hasil dari puluhan tahun pendekatan pembangunan yang mengabaikan ekologi, dan lemahnya kontrol atas industri yang diberi karpet merah demi pertumbuhan ekonomi. Padahal, jika kita jujur, pembangunan yang tidak ramah lingkungan selalu menyimpan bom waktu. Saat tanah menjadi tandus, air menjadi racun, dan udara tidak lagi layak dihirup, maka biaya yang harus kita tanggung jauh lebih besar daripada keuntungan sesaat. Di titik ini, CSR dan akuntansi lingkungan bukan lagi pilihan, tapi keharusan moral dan legal. Ini bukan tentang baik hati, tapi tentang keadilan antar-generasi.

Kabar baiknya, gerakan akar rumput sedang tumbuh di banyak tempat. Masyarakat adat, aktivis lingkungan, ilmuwan, dan sebagian kalangan bisnis progresif mulai menyuarakan pentingnya transformasi. Mereka memperjuangkan pelaporan keuangan yang mencantumkan nilai-nilai lingkungan. Mereka menuntut agar perusahaan tidak hanya memberi “sedekah hijau”, tetapi benar-benar mengubah proses produksinya menjadi berkelanjutan. Mereka mendesak agar akuntabilitas terhadap lingkungan menjadi bagian dari strategi bisnis utama, bukan sekadar pelengkap laporan tahunan.

Namun semua ini hanya akan bermakna jika negara hadir sebagai regulator dan pengawas yang tegas. Pemerintah harus memperkuat peraturan tentang pelaporan CSR dan akuntansi lingkungan, mengintegrasikan standar ESG (Environmental, Social, and Governance), serta memperketat sanksi bagi pelanggar. Lebih dari itu, negara harus memastikan bahwa masyarakat terdampak tidak lagi menjadi korban bisu atas nama “pembangunan.”

Hari Lingkungan Hidup Sedunia semestinya tidak hanya menjadi ritual tahunan, melainkan momen reflektif yang jujur. Refleksi atas betapa kita sering menggantungkan harapan pada pertumbuhan, tanpa memperhitungkan keberlanjutan. Refleksi atas betapa CSR sering dijadikan tameng, bukan jembatan menuju keadilan ekologis. Refleksi atas betapa akuntansi kita selama ini hanya menghitung untung rugi moneter, bukan nilai kehidupan dan kelestarian bumi.

Kini saatnya bergerak lebih dalam. Kita perlu mendorong perusahaan untuk tidak hanya membuat laporan CSR, tapi **mempraktekkannya secara**

radikal dan bertanggung jawab. Kita perlu mendesak agar akuntansi lingkungan tidak hanya menjadi pelengkap, tapi menjadi arus utama. Dan kita perlu mengubah pola pikir dari “keuntungan jangka pendek” menjadi “keberlanjutan jangka panjang.”

Indonesia adalah paru-paru dunia. Namun paru-paru itu kini sesak. Mari, sebelum alam memutuskan untuk menyembuhkan dirinya dengan cara yang menyakitkan bagi manusia, kita berubah. Kita bertanggung jawab. Kita bertindak. Bukan besok, bukan lusa tapi hari ini!

Land and Hand: Ketika Tanah tak Lagi Dirawat oleh Tangan

Ditulis oleh: Faika Alhabsyie

Pada 1 Juni 2025 kemarin, Makassar International Writers Festival (MIWF) yang diadakan di Benteng Fort Rotterdam, Makassar, berakhir sudah. MIWF membawakan tema Land and Hand di tahun ini, dimana tema ini mengusung land yang berarti tanah melambangkan ruang hidup, alam, kedaulatan, dan akses terhadap kehidupan. Sedangkan, hand berarti tangan yang melambangkan alat untuk merawat dan melindungi tanah, namun juga bisa menjadi penyebab dari kerusakan dan kehancuran yang terjadi.

Tema yang diangkat Makassar International Writers Festival tahun ini sungguh melambangkan situasi yang terjadi sekarang di negara ini. Akhir-akhir ini perampasan-perampasan terhadap hak, tanah, hutan, laut, identitas, dan berbagai ruang-ruang hidup lainnya marak dan sungguh benar-benar terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Lalu, bila Makassar International Writers Festival yang dengan lantang menyuarakan isu ini berakhir sudah, apakah suara kita juga perlu berhenti?

Berbicara terkait lahan adalah membicarakan persoalan lingkungan hidup: persoalan lahan yang tercemari sampah-sampah liar akibat perbuatan bejat dari saya, kamu, kita, dan kalian semua. Terkadang saya marah mengapa sejak kecil orang tua dan negara tidak mengajarkan saya bagaimana cara memilah sampah dengan benar, seperti apa kontribusi gas metana terhadap

krisis iklim, bagaimana kehidupan para hewan laut yang teracuni sampah yang datang dari darat–dari tangan kita semua, serta bagaimana hal itu bisa mempengaruhi hidup saya dan hidup kalian. Mengapa saya baru menyadari hal ini ketika telah dewasa? Mengapa di sekolah tidak ada kurikulum terkait sampah? Mengapa negara tidak mengajarkan dan memfasilitasi persoalan itu layaknya di negara Jepang sana? Apakah perlu jadi negara maju dulu baru kita mau peduli?

Berdasarkan data Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (SPSN) dari Kementerian Lingkungan Hidup pada April 2025 lalu, tercatat ada 33,621 juta ton timbulan sampah per tahun. Dari jumlah itu, 39,91% tidak terkelola. Dengan kata lain, sampah tidak terkelola per tahun rata-rata mencapai 13,417 juta ton.

Data Badan Pusat Statistika (BPS) pun mencatat bahwa Indonesia masih menerima impor sampah sebesar 262.903 ton. Belanda jadi negara paling banyak mengirim sampah ke Indonesia, yaitu total 107,5 ton. Negara kedua adalah Jerman, mengirim 59,1 ton sampah. Kemudian Belgia, mengirim 28,8 ton dan Amerika Serikat 19,6 ton. Bukankah ini adalah bentuk dari neo-kolonialisme yang dilakukan oleh negara maju kepada negara-negara global south? Tidakkah para penguasa di atas itu sadar selain hanya mementingkan uang-cuan-uang-cuan-uang-cuan dan uang dan cuan melulu?

Bila Indonesia tidak mampu mengelola sampah-sampah yang masuk itu, bila tak ada alat dan tata kelola yang mumpuni hingga bermunculan tempat pembuangan sampah terbuka (open dumpsite), bila ujung-ujungnya sampah-sampah impor itu tak mampu dikelola dengan baik dan hanya dibakar, mengapa dan mengapa perlu menerima sampah-sampah jajahan itu? Dari hasil data tersebut, kurang banyakkah sampah di negara ini untuk bisa dikelola? Itu baru yang ada di daratan. Bagaimana dengan yang ada di laut?

Merujuk pada The National Geographic, sampah laut atau marine debris adalah kumpulan sampah yang berakhir di samudra, laut, dan area air luas lainnya. Pada 2024 lalu, Peneliti Pusat Riset Oseanografi BRIN, Muhammad Reza Cordova, mengatakan bahwa ada lebih dari 8 juta ton sampah plastik

yang dibuang ke laut setiap tahunnya. Reza juga mengatakan bahwa lebih dari 70 persen sampah plastik di perairan berasal dari aktivitas manusia di daratan, termasuk yang melalui sungai dan pantai. Manusia hampir benar-benar tidak pernah memikirkan bahwa ada lebih dari 8 juta ton sampah plastik yang dibuang ke laut setiap tahun.

The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) juga mendefinisikan marine debris sebagai suatu bahan padat persisten yang diproduksi atau diproses baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, dibuang atau dibiarkan mengalir ke laut. Sampah-sampah tersebut memiliki potensi untuk mencederai kehidupan biota laut dan keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan.

Manusia menjadi akar masalah dari sampah yang mencemari lahan: tanah dan laut. Tangan-tangan kita memang sepertinya sengaja menjajah tanahnya sendiri. Kita sengaja merusak apa yang awalnya sudah terlihat baik-baik saja tanpa perlu diapa-apakan. Kita sengaja menjejali lahan kita dengan berbagai hal yang mengatasnamakan modernisasi, kesejahteraan, serba berkecukupan dan berbagai hal lainnya untuk dikomersialkan tanpa memikirkan bahwa ada yang menumpukan dirinya di sana, bahwa ada yang hidup dari dan untuk tanah.

Tanah yang meliputi daratan dan laut adalah sumber kehidupan bagi sepasang orang utan dan paus orca. Saya tidak menyebut bahwa tanah adalah semata-mata milik dan tempat penghidupan bagi manusia, sebab mereka adalah penyebab semua kekacauan ini. Tangan mereka telah lupa merawat ibunya, menolak menghidupi hutan-hutan yang lebih dulu hidup dibanding mereka, tidak lagi memberi rumah bagi seekor tarsius, dan sialnya mereka menyalahkan alam atas kelabilannya yang sudah tak mampu lagi menghasilkan kopi—yang katanya sumber ketenangan bagi manusia(l)-manusia(l) itu.

Saya teringat dengan penampilan Ruang Baca pada malam pembukaan MIWF akhir Mei kemarin. Viny, sang vokalis mengatakan bahwa dalam buku *How Much Land Does a Man Need* karya Leo Tolstoy mengajarkan kita untuk mempertanyakan seberapa banyak sebenarnya lahan yang dibutuhkan

seorang manusia untuk hidup. Cerita dari karya masterpiece sang penulis tersebut menyiratkan pesan akan sifat ketamakan manusia sekaligus akibat dari keserakahannya yang menuai kematian sang tokoh utama hingga akhirnya hanya meninggalkan tempat dimana ia dikuburkan yang besarnya hanya sekitar 1,8 meter–ukuran tanah yang dia butuhkan sebenarnya.

Lalu kemana perginya para fauna yang menguasai hutan dan biota-biota laut bila tanah yang merupakan lingkungan hidup mereka telah habis dijajah oleh manusia?

Jawaban yang paling kalian harapkan mungkin adalah ‘punah’ agar lahan-lahan mereka mampu kalian ambil alih untuk dijadikan rumah idaman. Namun, sebelum itu terjadi, mereka akan memastikan bahwa kalian pun–manusia ikut merasakan kepunahan. Tsunami akan datang mengacaukan daratan lantaran para tuna kelaparan sebab tak lagi mampu menemukan keberadaan krustasea. Kutub utara akan melelehkan dirinya sebab beruang kutub bersedih lantaran laktasinya tak menghasilkan apa-apa sehingga anak-anaknya terpuruk. Akan ada saatnya, gunung-gunung meletus dan akar pohon menjalari tubuh-tubuh manusia yang tak lagi dikenalnya, lalu dire muknya dengan penuh amarah dan kesedihan yang tiada batas. Sebelum segala yang hidup punah di tangan manusia, mereka akan menampakkan siksa neraka yang sesungguhnya di hadapan para insan.

Viny Mamonto, sang vokalis menutupnya pidato kecilnya dengan mengatakan, “Secuil tanah mungkin sudah cukup untuk memberikan kehidupan bagi kita, namun tidak sedikitpun dibutuhkan untuk memenuhi keserakahan”.

Foto & Username Instagram Penulis



@mhmdrisky



@caahhyaanntii



@muhfachrul_



@cak_daus



@bunda_melbi



@Azhar_asis



@sywuland



@andiieky



@ferdi_ansyah6910



@azi.wansaka



@silvaniandalita



@semeru2a



@arhmtwffka



@inkhapradana



@Kandar_wijaya



@rizkangasphoel



@zak_moeb



@randi.syafutra



@faikalhabsyie

WALHI
SULAWESI SELATAN

FAKTA
EKOLOGI